



United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

Pendidikan Anak Usia Dini dan Kebijakan Keluarga
Nº 10 – 2005

**Laporan Review Kebijakan:
Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini
di Indonesia**

**Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Inklusif
Divisi Pendidikan Dasar
Sektor Pendidikan UNESCO**

Proyek Review Kebijakan Anak Usia Dini UNESCO/OECD

Laporan Review Kebijakan : Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini di Indonesia

Dipresentasikan oleh

Seksi PAUD dan Pendidikan Inklusif
Divisi Pendidikan Dasar, Sektor Pendidikan
UNESCO, Paris

Januari 2005

Disetujui oleh

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda
Departemen Pendidikan Nasional Indonesia

Februari 2005

Kontribusi terbitan seri ini disambut dan harus disampaikan untuk review terhadap seri kebijakan keluarga dan anak usia dini pada alamat dibawah ini.

Copy tambahan laporan ini bisa didapat dari:

**The Section for Early Childhood and Inclusive Education
ED/BAS/EIE. UNESCO
7 Place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, FRANCE**

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=2905&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=465.html

Dicetak pada kegiatan
Workshop UNESCO Jakarta
Jl. Galuh (II) No. 5,
Kebayoran Baru
Jakarta 12110
Tel.: (62-21) 7399818
Fax: (62-21) 72796489
www.unesco.or.id

(ED-2005/WS/5)

UCAPAN TERIMA KASIH

Tinjauan ulang (Review) kebijakan perawatan anak usia dini di Indonesia dan persiapan laporan ini adalah hasil kerjasama yang dilakukan oleh bermacam kalangan termasuk stakeholders, spesialis kolega/ teman kerja, orang tua dan anak-anak. Dukungan mereka yang sangat berharga untuk membuat laporan ini benar-benar menggambarkan pengalaman yang luar biasa.

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bpk.Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional untuk berbagi dengan kami mengenai visinya kedepan tentang pendidikan anak usia dini di Indonesia.Saya sangat menghargai adanya dukungan finansial dari pemerintah untuk Tim Review dalam melaksanakan kunjungan lapangan di Indonesia. Untuk itu saya memahami adanya kejelasan komitmen pemerintah pada proyek ini dan tujuannya.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bpk.Gutama, Direktur Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) dan timnya untuk membuat perencanaan program kunjungan yang komprehensif untuk tim review, mengatur pertemuan dengan anggota yang terlibat dari pemerintah, stakeholder dan menyediakan data dan dokumentasi yang informatif.

Saya menyatakan terima kasih kepada Bpk. Bachrudin Musthafa, Bpk. Machin Erwan dan Bpk. Abdul Rajak Thaha yang menyiapkan latar belakang laporan ini dan Ibu Widarmi. D Wijana dan Bpk. Willy Helmi yang menemani tim review ke tempat-tempat kunjungan. Mereka memberikan informasi yang membuat tim mendapat pengertian yang lebih baik mengenai masalah kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia dalam waktu singkat. Spesial terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Enah Suminah, Ibu Mareta Wahyuni, Ibu Alhidayati Asiz, Bpk. Abdullah, Ibu Lestari Kusuma Wardhani, Ibu Sri Ratna Diah, Ibu Linda Sugiyarti, yang menyediakan informasi yang bermanfaat.

Spesial terima kasih juga saya sampaikan kepada petugas, guru, orang tua, dan anak-anak dari bermacam-macam pusat pelayanan PAUD yang dikunjungi, atas sambutannya yang hangat dan memberikan keterangan yang baik untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang mendetail dari tim review dengan kesabaran dan keterbukaan.

Rasa hormat saya juga kepada, Mr. Stephen Hill, Direktur UNESCO Jakarta, atas rencana proyek di negara ini. Mr Alisher Umarov, Ibu Mira Fajar dan Ibu Dina Maswar atas dukungan mereka baik dalam membuat pengaturan logistik dengan departemen. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mira Fajar atas bantuannya yang besar dalam membimbing tim review dan menyediakan bantuan dengan terjemahan selama kunjungan.

Review ini tidak mungkin terjadi tanpa usaha dari empat anggota tim review yang saya hormati untuk ikut sebagai anggota tim review yang terdiri koordinator tim : Mr. Gabriel Carron, serta anggota: Ms. Khoo Kim Choo, Mr. Raynald Lortie, dan Mr. Abrar Hasan. Yang dilakukan tim review sebelum kunjungan menyiapkan kerangka proyek, dan selama kunjungan mempelajari penerbitan kebijakan PADU di negara ini, dan setelah kunjungan membuat derap dari bermacam-macam masukan dan

menyediakan komentar yang bersifat kritis, untuk keberhasilan review dan kesiapan laporan ini. Sementara segala kekurangan laporan ini adalah benar-benar dari kami, para tim review yang juga sebagai arsitek dari laporan ini.

Terimakasih juga kepada Ms. Hye-Jin Park Perwakilan UNESCO Paris, yang membantu pelaksanaan sehari-hari proyek, menyediakan pengaturan logistik selama kunjungan dan membantu menyiapkan laporan. Saya merasa berhutang budi kepadanya atas kontribusinya yang berharga untuk persiapan bab I dan II dan juga lampiran. Ms. Hye-Jin Park juga mengedit teks akhir dari laporan ini.

Akhirnya , saya sumbangkan laporan ini kepada korban-korban tsunami khususnya anak usia dini di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dengan harapan ini memberikan kontribusi kepada pembangunan kembali hidup mereka.

Soo-Hyang Choi
Chief, Section for Early Childhood and Inclusive Education
Division of Basic Education, Education Sector
UNESCO, Paris.

DAFTAR ISI

Daftar isi dan Figur	8
Glossary	9
Catatan Teknis	10
RINGKASAN EKSEKUTIF	11
1. PEMBUKAAN	13
1.1 Perihal keproyekan	13
1.2 Kunjungan Review di Indonesia	14
1.3 Laporan Review	15
2. PROFIL NEGARA	15
2.1 Profil Sosial Ekonomi	15
2.2 Profil Pendidikan	16
2.3 Profil Anak Dini Usia	18
3. HASIL REVIEW	21
3.1 Pencapaian	21
3.2 Masalah Kritis I : Partisipasi	23
3.3 Masalah Kritis II : Investasi	30
3.4 Masalah Kritis III : Koordinasi	39
3.5 Masalah – Masalah Lain	42
4. REKOMENDASI	48
Referensi	52
Lampiran 1 : Jadwal Kunjungan Tim Review	53
Lampiran 2 : Tim Review	55
Lampiran 3 : Data Perbandingan Mengenai Indonesia	56

Daftar Isi dan Figur

Figur 1	: Tingkat Indeks perkembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	17
Tabel 1	: Profil kunci pelayanan anak usia dini	18
Figur 2	: Tingkat partisipasi kasar untuk pendidikan anak usia dini di negara - negara yang dipilih, 2001/2002	24
Figur 3	: Distribusi tingkat partisipasi kasar pada TK, RA, KB, TPA BKB, dan SD Kelas 1, 2001	25
Figur 4	: Perbandingan dari tingkat partisipasi kasar yang sekarang pada pendidikan dan pelayanan perawatan diperkirakan oleh pemerintah dan oleh tim review, 2001	25
Figur 5	: Tingkat partisipasi kasar yang proyeksikan dan yang ada sekarang pada anak usia 0+ - 6+ tahun di pelayanan pendidikan dengan ragamnya, 2001 dan 2015	26
Figur 6	: Tingkat kemiskinan dari Provinsi yang Kaya -10 dan yang Miskin -10, 1999	26
Figur 7	: Distribusi Provinsi Miskin -10, Kaya -10 dan Provinsi – provinsi lain, 1999	27
Figur 8	: Tingkat kemiskinan kurang dari rata-rata nasional pada Provinsi Miskin -10 dan Kaya -10, 2001	27
Figur 9	: Partisipasi kasar pada pelayanan anak usia dini berdasarkan daerah/wilayah	28
Figur 10	: Partisipasi kasar anak-anak berusia 0+ - 6+ tahun pada pelayanan perawatan dan pelayanan pendidikan pada propinsi Miskin -10 dan Propinsi Kaya -10, 2001	28
Figur 11	: Distribusi populasi anak-anak usia 0+ - 6+ tahun, dan pelayanan Pendidikan dan Perawatan pada propinsi Miskin -5 dan propinsi Kaya -5, 2001	29
Figur 12	: Income per kapita nasional PPP (\$), 2002	31
Figur 13	: Pengeluaran pada pendidikan, dalam % dari GDP, 2001/2002	31
Figur 14	: Pengeluaran per siswa sekolah negeri pada Pendidikan Dasar dan Lanjutan di negara-negara terpilih, dalam % dari per kapita GDP 2001/2002	32
Figur 15	: Partisipasi sekolah swasta pada pendidikan anak usia dini, Dalam % jumlah, 2000	32
Figur 16	: Temuan utama dari Studi High/Scope Perry Preschool sampai Usia 40 tahun, dalam %, 2004	34
Figur 17	: Dampak dari pendidikan anak usia dini 1 tahun pada peningkatan Income masa depan dari anak-anak yang berlatar belakang keluarga yang berbeda-beda	35
Figur 18	: Distribusi biaya yang diproyeksikan untuk KB, TPA, TK, RA, Posyandu dan BKB sampai 2015	36
Figur 19	: Pengeluaran lembaga/administrasi pendidikan anak usia dini, dalam % GDP, 2001	36
Figur 20	: Perbandingan siswa/guru pada pendidikan anak usia dini dari Negara-negara yang dipilih, 2001/2002	38

Glossary

BKB	Mother's Programme (Bina Keluarga Balita)
BKKBN	National Family Planning Coordination Board (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)
D2	Two-year teacher-training college diploma (D2)
ECE	Early Childhood Education (Pendidikan Anak Usia Dini)
EDI	EFA Development Index (Indeks Perkembangan Pendidikan Untuk Semua)
EFA	Education for All (Pendidikan Untuk Semua / PUS)
GDI	Gender-related Development Indeks (Indeks Perkembangan yang berhubungan dengan Gender)
GDP	Gross Domestic Product (Produk Domestik Kasar)
GEI	Gender Equality Index (Indeks kesetaraan Gender)
GNP	Gross National Product (Produk Nasional Kasar)
KB	Playgroup (Kelompok Bermain)
MONE	Ministry of National Education (of Indonesia) (Depdiknas)
NGO	Non-Government Organisation (LSM)
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development (Organisasi untuk Perkembangan dan Kerjasama Ekonomi)
PADU	Early Childhood Education (Pendidikan Anak Usia Dini)
Posyandu	Integrated Service Post (Pos Pelayanan Terpadu)
PPP GNI	Purchasing Power Parity Gross National Income (Paritas Daya Beli Income Nasional Kasar)
Pusat PADU	Early Childhood Education Centre
RA	Islamic Kindergarten (Raudhatul athfal)
Rps	Rupiahs (Unit of Indonesian Currenly)
SD 1	Grade one class in primary school (Kelas 1 SD)
SLTA	Upper secondary education (Senior)
Susenas	National Social and Economic Survey (Survey Sosial-Ekonomi Nasional)
TK	Kindergarten (Taman Kanak-Kanak)
TPA	Childcare Centre (Taman Penitipan Anak)
UNESCO	United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation

Catatan Teknis

Usia

Usia anak-anak dinyatakan sebagai berikut : Anak – anak yang lahir yang akan menginjak ke ulang tahun pertama dinyatakan berusia 0⁺ atau usia 0⁺ : anak-anak yang melewati ulang tahun mereka yang pertama dan menginjak ulang tahun kedua dianggap berusia 1⁺ atau usia 1⁺. Jadi usia 3⁺ artinya anak-anak yang melewati ulang tahun mereka yang ke 3 dan akan menuju ulang tahun ke 4, dan seterusnya.

Perawatan dan pendidikan Anak Usia Dini

Pada laporan ini istilah yang digunakan untuk menunjukkan batasan disiplin yang berhubungan dengan perawatan, perkembangan dan pembelajaran anak-anak yang berusia 0⁺ - 8 tahun

Pelayanan Anak Usia Dini

Pada laporan ini istilah yang digunakan untuk menunjukan semua macam baik formal, non formal dan informal tentang pelayanan perawatan dan atau pendidikan anak usia dini untuk anak usia 0⁺ - 6⁺ tahun dan atau untuk orang tua mereka. Anak-anak memasuki sekolah dasar pada usia 7⁺ - 8⁺ tahun .

Difinisi secara statistik menurut pemerintah pelayanan pendidikan anak usia dini termasuk 6 pelayanan – Taman Kanak-Kanak (TK), Raudathul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB),Taman Penitipan Anak (TPA), Bina Keluarga Balita (BKB), dan kelas 1 di Sekolah Dasar (SD). Tapi pada laporan ini, hanya 4 pelayanan yang pertama yang dimaksudkan sebagai pelayanan pendidikan anak usia dini, dengan alasan seperti yang diterangkan pada halaman 14 (point 3.2.6). Sementara pelayanan perawatan seperti yang didefinisikan oleh pemerintah, menunjuk 2 pelayanan orang tua secara khusus – Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan Bina Keluarga Balita (BKB). Informasi secara rinci pada pelayanan perawatan dan pendidikan ditunjukkan pada tabel 1 halaman 10.

Pendidikan Anak Usia Dini (Pra Sekolah Dasar)

Pada laporan ini, istilah untuk anak-anak usia 4⁺ - 6⁺ tahun berfokus pada persiapan untuk memasuki sekolah formal (pendidikan jalur sekolah).

Rupiah

Menurut nilai tukar pada januari 2005, US\$ 1 sama dengan Rp. 9.200.-

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kunjungan Tim Review

Dalam kerangka kerja UNESCO – OECD mengenai proyek review kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini, tim review yang terdiri dari 5 ahli mengunjungi Indonesia dari tanggal 25 Agustus s/d 2 September 2004 untuk melihat kembali kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini. Laporan ini hasil dari kunjungan tim review

Pencapaian

Dengan kreativitas Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini pada pendidikan non formal dari Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001, perawatan dan pendidikan anak di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Pelayanan non formal telah diperlancar untuk meragamkan dan memperluas tempat-tempat pelayanan. Stake holders dari semua jenjang telah digerakan untuk mengambil bagian pertanggung jawaban. Pendidikan untuk orang tua telah ditekankan, dan penekanannya ditempatkan pada pendekatan yang terintegrasi untuk perkembangan anak secara menyeluruh. Kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya perawatan dan pendidikan anak usia dini telah meningkat sesuai dengan permintaan.

Masalah Kritis

Tingkat partisipasi kasar dengan 20% pada pendidikan anak usia dini, Indonesia mempunyai ranking yang rendah diantara negara – negara yang berpenghasilan rendah. Jenjang regional dalam akses pedesaan dan perkotaan diungkapkan terutama dalam pelayanan pendidikan anak usia dini termasuk TK, RA, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak. Pelayanan perawatan untuk orang tua yaitu POSYANDU dan BKB yang lebih merata terakses dan terdistribusi.

Pengeluaran biaya pendidikan di Indonesia rendah (1,3% GDP) masih lebih rendah untuk pendidikan anak usia dini yang pada kenyataannya 0. karena tidak adanya investasi pemerintah, anak-anak yang memanfaatkan pelayanan PAUD yang membayar adalah berasal dari kelompok orang yang berpenghasilan tinggi. Pengeluaran biaya PAUD pada tingkat pendidikan anak usia dini hampir 100% swasta, dan orang tua yang menanggung beban. Meningkatnya investasi masyarakat penting, dan penggunaan efisien sumber-sumber masyarakat penting untuk memperluas PAUD kepada lebih banyak anak-anak terutama mereka yang dari keluarga tidak mampu atau berpenghasilan rendah.

Koordinasi administrasi masih merupakan tantangan yang menakutkan. Terutama hangatny masalah koordinasi dua direktorat dalam DEPDIKNAS yang menjalankan pelayanan formal dan non formal dengan jalur yang terpisah. Inspeksi, pelatihan, pengembangan kurikulum dan perencanaan kebijakan terbagi dua Direktorat secara besarnya.

Banyak usaha dibutuhkan untuk menyatukan kebutuhan dari pelaksana pendidikan dan perawatan dengan cara yang lebih terintegrasi. Semua tempat-tempat yang memungkinkan harus diperluas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dari bermacam-macam kelompok kerja, dan mekanisme kualitas pengawasan perlu ditentukan di

tempat. Data PAUD benar- benar kurang , terutama data partisipasi dari setiap jenjang usia, data keuangan dan informasi mengenai guru-guru PAUD. Metode pelaporan yang jelek menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan data yang dilaporkan dalam dokumen pemerintah , termasuk Rencana Aksi Nasional Pendidikan Untuk Semua.

Rekomendasi

Pelayanan terpadu POSYANDU dan BKB sepantasnya secara terus menerus mendukung penyediaan pelayanan anak usia dini dengan akses yang sama terhadap pelayanan pendidikan dan perawatan dasar. Perpaduan harus terus menerus menjadi strategi pemerintah untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas. Tetapi suatu peningkatan investasi pemerintah tidak terelakkan dibutuhkan untuk meyakinkan akses yang memadai untuk pelayanan pendidikan antara anak-anak yang lebih tua. Pendidikan anak usia dini yang bebas bisa menjadi prioritas pemerintah dalam berinvestasi. Kehadiran dua Direktorat yang bertanggung jawab kepada anak usia dini di DEPDIKNAS adalah penting untuk merasionalisasi pelayanan anak usia dini, pelatihan, monitoring, evaluasi dan sistem administrasi. Desentralisasi adalah suatu faktor untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan pelaksanaan dan keputusan-keputusan pemerintah untuk perubahan kebijakan harus di terjemahkan kedalam perundang-undangan untuk meyakinkan pelaksanaannya.

1. PEMBUKAAN

1.1. Perihal Proyek

1.1.1. Konteks:

Pertemuan dunia yang diselenggarakan di Dakar, Senegal pada tahun 2000 sekaligus untuk memperingati ulang tahun ke 10 Pendidikan Untuk Semua (PUS) menegaskan kembali komitmennya terhadap pendidikan dan perawatan anak usia dini dan menentukan perkembangannya sebagai hal yang pertama dari 6 tujuan pertemuan Pendidikan Untuk Semua. Sampai sekarang kebanyakan di negara yang sedang berkembang Pendidikan Anak Usia Dini belum menjadi bagian dari kebijakan masyarakat dan pemerintah mempunyai kapasitas yang terbatas untuk mengembangkan sistem dan kebijakan untuk itu. Terutama kurangnya pengetahuan mengenai pilihan dan strategi kebijakan untuk mempromosikan perkembangan menyeluruh anak-anak dengan sumber-sumber yang terbatas.

1.1.2. Dalam hubungan ini, UNESCO meluncurkan proyek review (peninjauan ulang) kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dari UNESCO – OECD sebagai bagian dari perencanaan 2004 – 2005. Tujuannya adalah untuk menyediakan negara-negara yang terpilih mendapat kesempatan untuk mereview kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini mereka dan mengidentifikasi pilihan-pilihan dan strategi yang nyata untuk perbaikan. Adapun 4 negara yang dipilih berdasarkan keinginan yang diusulkan mereka yaitu: Brazil, Indonesia, Kazakhstan dan Kenya. Review yang ada sekarang dilakukan sebagai bagian dari partisipasi Indonesia dalam proyek ini, yang diselenggarakan bekerjasama dengan OECD.

1.1.3. Kegiatan

Setiap pelaksanaan review suatu negara melibatkan persiapan mengenai latar belakang laporan, review kunjungan yang dilakukan oleh tim review dan laporan review berisikan rekomendasi kebijakan khusus. Laporan review akan dipresentasikan kepada pengambil kebijakan dan komponen terkait secara nasional untuk mendiskusikan dan menindak lanjuti. Kantor-kantor lapangan UNESCO penuh perhatian mengorganisir kegiatan satelit untuk membangun atau mensosialisasikan lebih luas hasil review. Pada tingkat global hasil dari proses review dari 4 negara akan diterbitkan sebagai laporan sintesis, dan ringkasan eksekutif akan disuguhkan sebagai materi referensi kebijakan untuk perencanaan Pendidikan Anak Usia Dini di negara-negara lain.

1.1.4. Struktur Pelaksanaan :

Perencanaan dan koordinasi proyek secara keseluruhan adalah tanggung jawab sekretariat proyek yang dibentuk kantor pusat UNESCO. Untuk pelaksanaan ditingkat nasional kelompok kerja suatu negara dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dengan menandatangani MOU dengan UNESCO. Kelompok kerja negara yang disatukan dan dibantu oleh kantor lapangan UNESCO yang terkait bertanggung jawab

untuk menyiapkan latar belakang laporan dan mewakili pengambil kebijakan tingkat nasional dimana laporan review akan diberikan.¹

1.1.5. Kerangka Kerja Tinjauan Ulang (Review framework)

Ada 5 kategori masalah kebijakan mengenai proyek : akses, kualitas, sumber-sumber, koordinasi pemerintah dan perkembangan data / penelitian. Tetapi beranggapan bahwa masalah kebijakan ini akan berwujud berbeda-beda disetiap negara, pertimbangkan juga diberikan pada masalah-masalah khusus disuatu negara dan mengangkat hasil review tergantung pada situasi dan kebutuhan khusus dari suatu negara. Pelayanan yang direview termasuk rangkaian pendidikan formal, non formal dan in formal untuk Pendidikan Anak Usia Dini dari sejak anak lahir sampai usia memasuki Sekolah Dasar. Termasuk juga pelayanan untuk orang tua.

1.2 Tinjauan Ulang Kunjungan (Review Visit) di Indonesia

1.2.1 Persiapan

Diutamakan pada review visit, latar belakang laporan disiapkan oleh kelompok kerja suatu negara dibentuk oleh DEPDIKNAS dan dikirimkan kepada UNESCO². Dalam pemilihan tempat kunjungan, perbedaan-perbedaan dalam strata sosial ekonomi, keseimbangan regional, kelompok usia, etnik/agama dan dampak kebijakan yang diperhitungkan.

1.2.2 Jadwal

Kunjungan lapangan dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus s/d 2 September 2004 di Provinsi D.K.I. Jakarta, D.I.Yogyakarta (Yogyakarta, Sleman dan Kulon Progo), Banten (Rajeg) dan Sulawesi Selatan (Maros, Baru dan Makassar). Tempat-tempatnya termasuk Sekolah Dasar, TK/RA, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Posyandu, BKB, Pusat PAUD, Sekolah non formal dan Pusat Pelatihan Guru³.

1.2.3 Tim Review juga berpartisipasi dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan PAUD di Indonesia, seperti perwakilan dari Depdiknas, departemen-departemen lain, anggota Forum PADU Pusat dan pejabat pemerintah daerah. Komponen terkait tingkat nasional lainnya (Stakeholders) seperti akademi, profesional, LSM jaringan asosiasi nasional yang memberikan pelayanan (seperti asosiasi guru) dan pengguna pelayanan (seperti kelompok orang tua) juga hadir dalam pertemuan itu.

1.2.4 Tim Review

Tim Review terdiri dari ahli-ahli international dari spesialisasi yang berbeda-beda terdiri: Gabriel Carron (ahli senior yang sebelumnya menjabat IIEP, Paris), Khoo Kim Choo (konsultan internasional tentang keluarga dan anak-anak, Singapura), Raynald Lortie (ahli statistik, UIS, Montreal, Canada), Abrar Hasan (OECD, Paris) dan Soo-Hyang Choi (UNESCO, Paris). Tim review didampingi dan dibantu oleh personalia dari kelompok kerja suatu negara, Hye-Jin Park dari UNESCO, Paris, dan Mira Fajar dari Kantor UNESCO Jakarta⁴

¹ For details, see the Implementation Guidelines for the UNESCO/OECD Early Childhood Policy Review Project, of which a copy can be obtained from UNESCO Headquarters (sh.choi@unesco.org).

² A copy can be obtained from UNESCO. Please contact: sh.choi@unesco.org

³ See Annex 1 for details

⁴ See Annex 2 for details.

1.3 Laporan Review (The Review Report)

1.3.1 Laporan Review dipersiapkan berdasarkan catatan-catatan observasi dan informasi yang disediakan dalam latar belakang laporan yang dikirim oleh anggota tim review. Usaha-usaha dibuat untuk mengangkat masalah-masalah kunci yang patut mendapat perhatian segera dari pemerintah daripada menginventaris semua observasi. Analisa secara rinci dicobakan untuk beberapa masalah yang kritis yang relevan dengan data yang tersedia. Rekomendasi di fokuskan pada kebijakan global dan tugas utama yang spesifik yang perlu diluncurkan sebagai prioritas.

1.3.2 Proses Review dan pembuatan rekomendasi diarahkan oleh asumsi-asumsi berikut. Pertama, ujian utama dari Pendidikan Anak Usia Dini adalah perkembangan anak secara menyeluruh atau seutuhnya. Persiapan anak untuk sekolah formal dipandang sebagai bagian integral dari perkembangan menyeluruh, bukan sebagai tujuan yang terisolasi. Kedua, kebijakan pemerintah mengenai Pendidikan Anak Usia Dini harus memihak kepada yang miskin, memberikan ketidaksamaan sebagai prioritas. Ketiga, Pendidikan Anak Usia Dini sebagai sarana meletakkan pondasi untuk belajar sepanjang hayat, dan sebagai transisi dari rumah ke pelayanan anak usia dini yang mana pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini ke sekolah harus mulus.

1.3.3 Beberapa kesukaran yang dihadapi didalam mencari bagaimana menunjukkan analisa yang berdasarkan bukti-bukti (evidence-based analysis) dengan perspektif yang komprehensif. Kekurangan utama adalah kurangnya data terutama mengenai kegiatan di Taman Kanak-Kanak dan Raudathul Athfal. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang formal dibawah Direktorat Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Departemen Pendidikan Nasional. Berdiskusi dengan melibatkan data yang ada pada laporan ini yang kemudian diartikan dengan hati-hati. Data yang diambil dari Rencana Aksi Nasional : Pendidikan Untuk Semua (PUS) juga dipergunakan untuk memperkecil kemungkinan bila terjadi kesalahan-kesalahan. Kekurangan informasi mengenai kegiatan Departemen yang diluar Depdiknas juga dibuat Review dan rekomendasinya tidak sesuai dengan perspektif dari Depdiknas.

2. PROFIL NEGARA

2.1 Profil Sosial Ekonomi⁵

2.1.1 Kependudukan

Indonesia adalah salah satu negara yang padat penduduknya di dunia dengan 200 juta orang dan sebanyak 30% dibawah usia 15 tahun. Dan profil demografinya stabil. Pertumbuhan penduduk telah menurun dengan tingkat pertumbuhan 1,1% untuk tahun 2002 – 2015. Tingkat kesuburan 2,3% pada tahun 2002 juga telah menurun.

2.1.2 Ekonomi

Indonesia menduduki ranking negara dengan pendapatan rendah atau lebih rendah dari menengah dengan daya beli seimbang Gross National Income (PPP GNI) perkapita \$ 3,070 (Tahun 2002). Tingkat pertumbuhan produk domestik kasar (GDP) 3,7% tahun

⁵ See Annex 3 for a more detailed profile in comparison e\with other countries.

2001-2002 yang relatif rendah. Industri merupakan distribusi terbesar terhadap GDP. Dengan GINI Indeks⁶ 34,3 tahun 2002, Indonesia tidak mempunyai perbedaan kesenjangan dalam distribusi pendapatan.

2.1.3 Perkembangan Anak dan Perempuan

Tahun 2002 sekitar 59% perempuan antara usia 15 dan 64 tahun di Indonesia menjadi buruh. Pendidikan mereka tidak menghadapi hambatan utama : tingkat aksara perempuan dewasa terus meningkat selama 20 tahun terakhir mencapai 83% tahun 2002. walaupun populasi perempuan berpartisipasi aktif dalam pendidikan dan tenaga kerja tetap merupakan indeks perkembangan gender menduduki tingkat yang rendah ranking 90 dari 144.

2.1.4 Sebanyak 89% perempuan hamil di Indonesia menerima perawatan pra kelahiran. Tetapi petugas kesehatan yang terampil menangani kelahiran hanya 64%. Ini tergambar pada tingginya kematian ibu yang melahirkan dengan perbandingan 230 untuk setiap 100.000 kasus. Dengan standar global, tingkat kematian dibawah 5 di Indonesia (45 per 1000 kelahiran) relatif rendah dan tingkat imunisasi campak relatif tinggi (76%).

2.2 Profil Pendidikan⁷

2.2.1 Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan jalur sekolah (formal) 6 tahun di Sekolah Dasar (SD), 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP), 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan 4 tahun di Perguruan Tinggi. Selama 9 tahun di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama merupakan pendidikan wajib belajar. Pada prinsipnya sebelum tahun 1994 kebijakan pendidikan adalah bebas wajib belajar. Anak-anak mulai bersekolah secara formal pada usia 7⁺ - 8⁺ tahun⁸.

2.2.2 Baik pendidikan SMP maupun SMA mempunyai 2 jalur – umum (SMU) dan kejuruan (SMK). Pendidikannya lebih tinggi ditawarkan Diploma, Sarjana Muda dan Kursus-Kursus. Akademi menawarkan D1, D2, D3 dan D4, sementara Universitas menawarkan S1. Pendidikan yang lebih tinggi menawarkan program S2 dan S3. Universitas Terbuka (UT) menyediakan program pendidikan S1 jarak jauh.

2.2.3 Paralel dengan sistem pendidikan sekuler adalah sekolah-sekolah agama. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekolah Dasar Islam, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pendidikan tingkat SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) sejajar SMA. Universitas islam juga ada.

2.2.4 Paralel dengan sistem pendidikan formal dengan program non formal yang diakreditasi dikenal dengan nama program Kelompok Belajar Paket A (Kejar Paket A) merupakan program non formal setara dengan Sekolah Dasar. Program Kelompok Belajar Paket B (Kejar Paket B) setara dengan SMP; dan program Kelompok Belajar Paket C (Kejar Paket C) setara dengan SLTA.

⁶ An index that measures the extent to which the distribution of income among individuals or households within a country deviates from a perfectly equal distribution.

⁷ See Annex 3 for a more detailed profile in comparison with other countries.

⁸ 6⁺ year olds can also be admitted.

2.2.5 Tingkat aksara orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan usia 15 keatas di Indonesia relatif tinggi 92% dan 83%, dibanding dengan tingkat aksara rata-rata dunia 84% dan 71%. Kebijakan pendidikan bebas wajib belajar 9 tahun meningkat dari tingkat aksara secara keseluruhan untuk penduduk yang berumur 10 tahun keatas pada beberapa puluh tahun terakhir.

2.2.6 Partisipasi dalam Pendidikan

Perbandingan partisipasi kasar resmi pada pendidikan anak usia dini di Indonesia 20 % tahun 2001-2002. Partisipasi murni pada SD dan SMP 96% dan 81% terjadi tahun 2003, tetapi perbandingan partisipasi murni di SLTA masih hanya 50%. Indonesia mempunyai prosentase tinggi untuk partisipasi swasta, terutama pendidikan anak usia dini, dimana partisipasi di sekolah swasta hampir 100% jumlahnya.

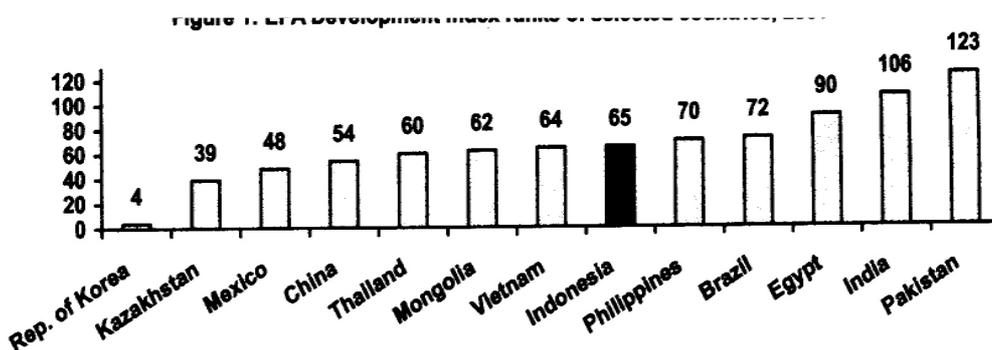
2.2.7 Pendanaan Pendidikan⁹

Penanggungjawab keuangan untuk mencapai bebas wajib belajar 9 tahun dibagi antara pemerintah, provinsi, kabupaten dan kota madya.

2.2.8 Pengeluaran Indonesia untuk pendidikan sesuai dengan prosentase GDP sangat rendah hanya 1,3%. Sementara pendidikan SD dan Sekolah Lanjutan Menengah naik menjadi 80% dari anggaran pendidikan, pengeluaran untuk pendidikan anak usia dini hanya 0,1%.

2.2.9 Pencapaian dari tujuan Pendidikan Untuk Semua (PUS) indeks perkembangan PUS (EDI) di Indonesia adalah 0912¹⁰ tahun 2001. Rankingnya diantara negara-negara lain diperlihatkan pada Figur 1. Nilai dari 4 konstituen secara individu (EDI) di Indonesia adalah sebagai berikut : 54 untuk partisipasi di SD, tingkat aksara orang dewasa 68, Indeks Persamaan gender (GEI) 61, tingkat kehidupan (survival) sampai kelas 5 adalah 71. Konstituen yang terlemah dari EDI tingkat hidupnya sampai kelas 5, ini menunjukkan perlu perbaikan dalam efisiensi pendidikan dasar, yang langsung berhubungan dengan penyediaan pendidikan dan perawatan anak usia dini.

Figur 1 : Tingkat Indeks perkembangan PUS dari negara-negara terpilih, 2001



Source: EFA Global Monitoring Report, (2004). Paris: UNESCO Publishing.

⁹ See Tables 7, 8 and 12 in Annex 3.

¹⁰ The arithmetical mean value of net enrolment rate in primary education, adult literacy rate, gender equality index and survival rate to grade 5. the EDI value falls between 0 and 1. The closer to 1 a country's EDI is, the nearer it is to achieving EFA overall.

2.3 Profil Anak Usia Dini

2.3.1 Status Legislatif

Di Indonesia pendidikan anak usia dini bukan bagian dari sistem pendidikan formal. Menurut undang-undang sistem pendidikan nasional no 20/2003 mengakui pendidikan anak usia dini sebagai langkah menuju pendidikan dasar dan ditetapkan bahwa ini dapat di organisasi secara formal, non formal atau in formal. Walaupun beberapa ketidak konsistenan didalam undang-undang mengenai status pendidikan anak usia dini dalam sistem pendidikan, jalannya telah disediakan di Indonesia dengan pondasi yang lebih kuat untuk menjalankan Pendidikan Anak Usia Dini.

2.3.2 Struktur pelayanan

Ada 5 kunci pelayanan anak usia dini dapat diidentifikasi di Indonesia. Ringkasan profilnya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1: Profil kunci pelayanan anak usia dini¹¹

	TK/TK Islam (RA)	Kelompok Bermain	Taman Penitipan Anak	Posyandu	Bina Keluarga Balita (BKB)
Usia	4 ⁺ - 6 ⁺ tahun	2 ⁺ - 6 ⁺ tahun	3 Bulan – 6 ⁺ tahun	0 ⁺ - 6 ⁺ tahun	0 ⁺ - 5 ⁺ tahun
Target	Anak	Anak	Anak	Anak dan Ibu	Ibu
Fokus	Pendidikan Anak Usia Dini Perkembangan anak dan kesiapan bersekolah Ajaran agama di RA	Pendidikan Pada dasarnya bermain-main Perkembangan emosi dan mental	Pelayanan perawatan untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja; digabung dengan komponen perkembangan emosi dan mental	Pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak; digabung dengan pendidikan orang tua	Pendidikan orang tua; kegiatan untuk anak juga ditawarkan selama pertemuan
Waktu kegiatan	2 Jam setiap hari	2 Jam, minimum 3 kali seminggu	8 – 10 jam Setiap hari	2 Jam, 2 kali sebulan	2 Jam, 2 kali sebulan
Jumlah Lembaga (Tahun)	TK: 47,746 (2002) RA: 11,560 (2002)	1, 256 (2002)	1,789 (2002)	245,758 Posyandu banyak insentif	244,567 Kelompok BKB dengan 125 Ibu-ibu per kelompok (2000)
Jumlah anak yang terdaftar (tahun)	TK: 1,749,722 (2002) RA: 378,094 (2002)	36.649 (2002)	15,308 (2002)	60 – 70% tingkat rata-rata yang hadir oleh ibu-ibu	21% tingkat rata-rata yang hadir oleh ibu-ibu (2000) Jumlah anak-anak yang diperkirakan dicapai 2,256,204
Persyaratan kualifikasi guru	2 tahun di akademi (D2)	SLTA dengan training khusus termasuk magang	SLTA dengan training khusus termasuk magang	SMP dengan pelatihan khusus termasuk magang	SMP dengan pelatihan berhubungan dengan kerja termasuk magang
Agen pemerintah yang bertanggung jawab	Depdiknas Departemen Agama Supervisi dan Monitoring RA	Departemen Sosial Departemen Pendidikan Nasional	Departemen Sosial, komponen supervisi Departemen Diknas garis-garis	Departemen Kesehatan – bantuan teknis, supervisi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan BKKBN

¹¹ Statistical data on TK, RA, KB and TPA in this table were presented by the minister of National Education at the E-9 Ministerial Review Meeting organized by UNESCO in December 2003. the data on Posyandu and BKB have been extracted from the National Case Study on the Early Childhood Care and Education in Indonesia prepared by the UNESCO office in Jakarta for the name Ministerial Review Meeting.

		Kurikulum	besar perkembangan	Menteri dalam negeri memberi inisiatif pelayanan dalam kerjasama dengan kesejahteraan keluarga gerakan pemberdaya	
--	--	-----------	-----------------------	--	--

2.3.3 Taman Kanak-Kanak adalah pelayanan pendidikan anak usia dini terutama disediakan untuk anak usia 4⁺ - 6⁺ Tahun. Demikian pula Raudathul Athfal tetapi Raudathul Athfal menekankan pada pengajaran agama Islam. Baik TK maupun RA berkembang pesat belakangan tahun ini (tingkat partisipasi kasar naik dari 6% tahun 1970 sampai 19% tahun 2000) aksesnya terbatas hanya untuk orang-orang tertentu.

2.3.4 Kelompok Bermain menyediakan pendidikan untuk anak usia 2⁺ - 6⁺ tahun. Tetapi di daerah perkotaan Kelompok Bermain cenderung untuk kelas junior yaitu untuk anak usia 2⁺ dan 4⁺ tahun, sedangkan usia 4 - 6 tahun di TK atau RA, penekanannya pada kegiatan bermain. Bagi daerah yang tidak ada TK atau RA, Kelompok Bermain semata-mata nama dari pelayanan pendidikan setengah hari untuk anak 2⁺ - 6⁺ tahun.

2.3.5 Taman Penitipan Anak menyediakan pendidikan untuk anak usia 3 bulan sampai 6 tahun sementara orang tua mereka (terutama Ibu) bekerja. Taman Penitipan Anak dibangun dekat tempat kerja orang tua. Tetapi di daerah perkotaan lama-lama menjadi kegiatan pendidikan menyediakan kebutuhan mendidik dan merawat untuk ibu-ibu pekerja yang berpenghasilan tinggi, sementara di pedesaan fungsi kekeluargaan anak masih dominan.

2.3.6 Posyandu pada dasarnya Pos Pelayanan Terpadu yang merupakan pusat kesehatan masyarakat dimana ibu-ibu hamil dan menyusui datang untuk menerima perawatan kesehatan (misalnya gizi tambahan, imunisasi dan lain-lain) untuk diri mereka dan juga anak mereka. Sekarang mulai berubah menjadi pusat pelayanan yang lebih luas untuk ibu-ibu dimana mereka datang 2 kali sebulan bukan saja untuk menerima perawatan kesehatan tetapi juga untuk belajar tentang orang tua yang memberikan pelayanan pada anak-anaknya khususnya anak usia dini. Baru-baru ini, ada usaha pelayanan kerjasama untuk anak-anak yang menemani ibu mereka ke pusat-pusat pelayanan.

2.3.7 Tujuan utama dari BKB adalah untuk menyediakan pada ibu-ibu informasi mengenai keterampilan orang tua – bagaimana membesarkan dan mengawasi perkembangan fisik, emosi, intelektual anak usia dini. BKB sekarang disatukan dengan Posyandu yang menekankan kembali fungsi menjadi orang tua nantinya yang bisa melayani anaknya yang masih usia dini. Baik Posyandu maupun BKB dilakukan oleh kader yang terlatih.¹²

¹² Health care at Posyandu by government health care workers

2.3.8 Bantuan Departemen

Indonesia mempunyai pengaturan departemen yang bertanggung jawab secara paralel. Departemen Pendidikan Nasional bertanggung jawab untuk pengawasan dan pengembangan Taman Kanak-Kanak bekerjasama dengan Departemen Agama bertanggung jawab untuk Raudthul Athfal. Sama halnya tanggung jawab Departemen Sosial tumpang tindih dengan Departemen Pendidikan Nasional. Departemen kesehatan juga terlibat dengan kelompok usia ini untuk meyakinkan perkembangan kesehatan anak dalam pelayanan anak usia dini, dan berubah pelan-pelan secara khusus menyediakan bantuan teknis dan supervisi Posyandu. BKKBN bertanggung jawab untuk menyampaikan dan menyediakan Bina Keluarga Balita, untuk anak-anak 0+ - 5+ tahun, bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang bertanggung jawab untuk komponen kebijakan Bina Keluarga Balita.

2.3.9 Didalam struktur Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia memelihara perkembangan kebijakan, menyediakan dan mensupervisi pelayanan anak usia dini dari jalur pendidikan non formal. Direktorat TK dan SD dilain pihak mempunyai pendekatan lebih formal, mengutamakan manajemen dan operasional TK/RA dari jalur pendidikan sekolah (formal). Pada tahun 2001 Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia dibentuk dibawah Depdiknas untuk mempromosikan pendekatan luas kepada anak usia dini dan mengembangkan kualitas pelayanan anak usia dini.

2.3.10 Mekanisme koordinasi

Dua mekanisme yang ada berfungsi sebagai kendaraan yang pelakunya berbeda dari pemerintah dan masyarakat sipil dapat digunakan untuk menempa kemitraan – Forum PADU dan Konsorsium PADU. Forum terdiri dari pegawai pemerintah tingkat tinggi dari semua sektor departemen dan badan koordinasi multi sektoral. Fungsi utama adalah untuk mengembangkan dan mengkoordinir kebijakan anak usia dini. Pada tahun 2001 Direktorat PADU mendukung terbentuknya Konsorsium PADU yang terdiri dari para profesional dan tokoh masyarakat, untuk mengkoordinir pelayanan anak usia dini jalur pendidikan luar sekolah (non formal) tidak termasuk TK/RA lintas departemen yang berbeda.

2.3.11 Kebijakan Desentralisasi

Kebijakan desentralisasi di Indonesia mulai beraksi tahun 2001. Sejak itu banyak tanggung jawab administrasi untuk pendidikan telah ditransfer dari Depdiknas dan cabang-cabang regional ke kota madya dan kabupaten.

2.3.12 Pendanaan

Tiga sumber utama pendanaan untuk pendidikan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah dan orang tua. Dana pemerintah langsung diambil dari anggaran pendidikan dalam bentuk Block Grants disentralisasi dari pemerintah pusat ke provinsi dan terus ke tingkat administrasi lebih bawah.

2.3.13 Tujuan Pendidikan Untuk Semua (PUS) untuk PAUD

Rencana Aksi Nasional PUS mengenai anak usia dini termasuk tujuan-tujuan berikut

1. Meningkatkan tingkat partisipasi anak yang berusia 0+ - 6+ tahun dalam pelayanan perawatan dari 37% tahun 2001 sampai 85% pada tahun 2015;
2. Meningkatkan tingkat partisipasi anak yang berusia 0+ - 6+ tahun dalam pelayanan pendidikan dari 28% tahun 2001 sampai 75% pada tahun 2015
3. Meningkatkan kualitas pelayanan anak usia dini
4. Meningkatkan jumlah kemitraan swasta dalam penyediaan pendidikan dan perawatan anak usia dini.

3. HASIL REVIEW

3.1 Pencapaian

3.1.1 Kreativitas Direktorat PADU, Depdiknas yang lahir tahun 2001 dalam sisi non formal merupakan kejadian yang menonjol yang mencetuskan perubahan yang signifikan dalam cara pelayanan anak usia dini secara konsep dan diprogramkan serta disampaikan di seluruh Indonesia.

3.1.2 Pendekatan Non formal

Pencapaian yang terlihat dari Direktorat PADU adalah percepatan pelayanan pendidikan jalur luar sekolah (non formal) dalam struktur administrasi pemerintah. Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak walaupun telah ada sebelum adanya Direktorat PADU; tetapi dengan Direktorat PADU pelayanan lapisan bawah lain yang sudah ada diakui dan di rangkul oleh perencana pemerintah. Meningkatkan membantu meragamkan tempat-tempat pelayanan untuk anak usia dini yang sebelumnya dibatasi untuk pelayanan TK/RA dalam jalur pendidikan sekolah (formal). Disamping itu ini membuka kemungkinan memperluas pelayanan anak usia dini pada anak-anak yang kurang beruntung (anak-anak yang kurang mampu).

3.1.3 Memperbanyak stakeholders

Dengan mengetahui penyedia pelayanan yang beragam bisa menjadi strategi untuk meragamkan tempat-tempat pelayanan, Direktorat PADU meluncurkan usaha pembelaan yang gigih untuk menggerakkan masyarakat usaha swasta, LSM, orang tua dan penguasa lokal. Dalam proses, pengertian publik secara umum mengenai pentingnya anak usia dini dibangkitkan sesuai dengan permintaan pelayanan anak usia dini. Lebih penting lagi kemitraan dibentuk pada tingkat lokal memberikan mekanisme penting untuk mempertegas penyampaian pelayanan anak usia dini dalam era desentralisasi.

3.1.4 Pendidikan Orang Tua

Orang tua adalah pelaku kelompok lain yang mempunyai kepentingan dalam mendidik dan merawat anak usia dini diangkat oleh Direktorat PADU. Posyandu pada intinya adalah pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak usia dini berubah menjadi pelayanan anak usia dini yang terintegrasi dimana ibu-ibu berkunjung bukan saja untuk perawatan kesehatan tetapi juga untuk mendapat informasi bagaimana menyediakan stimulasi pendidikan awal kepada anak-anak mereka. Walaupun Posyandu tidak terlibat dalam data mengenai partisipasi anak dalam pelayanan perawatan – masalah yang ada harus diteliti – ini jelas menggambarkan perspektif dan perhatian pemerintah dalam

memikirkan orang tua dan keluarga sebagai faktor penting untuk pendidikan dan perawatan anak usia dini.

3.1.5 Pendekatan Terpadu

Salah satu point kuat dari Direktorat PADU adalah penekanan pada penerapan pendekatan terpadu. Terutama yang diangkat adalah keterpaduan pelayanan kesehatan atau perawatan dan pendidikan yang secara baik dilakukan dengan penyampaian terpadu dari posyandu dan BKB. Ditaman Posyandu usaha-usaha diarahkan ke pelayanan orang tua terpadu dengan pelayanan untuk anak-anak sehingga fasilitas pelayanan dapat menyediakan baik untuk orang tua maupun anak-anak. Pendekatan terpadu memungkinkan pemerintah menyediakan pelayanan yang luas tanpa membentuk pelayanan-pelayanan baru yang mahal. Juga mempertimbangkan bahwa keterpaduan adalah salah satu indikator kualitas yang penting, Indonesia telah mengambil langkah penting ke arah peningkatan kualitas pelayanan anak usia dini.

3.1.6 Koordinasi

Arah untuk pelayanan terpadu pada tingkat pelaksanaannya koordinasi dipentingkan antara pelaku-pelaku yang berbeda pada tingkat sistem. Direktorat PADU melakukan ini dengan membuat mekanisme koordinasi. Dibawah kepemimpinannya mekanisme koordinasi antar sektoral dibentuk – Forum PADU untuk pelaksana pemerintah tingkat tinggi mengkoordinasikan kebijakan, dan Konsorsium PADU untuk teknis tingkat menengah pelaksana pemerintah dan profesional pada masalah-masalah program. Walaupun keefektifan mereka, terutama didalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan terpadu kemungkinan menimbulkan perdebatan, adanya dua mekanisme koordinasi ini telah memberi sinyal kepada stakeholders yang terlibat bahwa usaha mereka akan menghasilkan buah – berhasil ketika mereka bekerja dalam kemitraan. Mereka sebenarnya dapat memberikan tekanan yang keras untuk menggerakkan stakeholders yang bermacam-macam untuk mendukung pelaksanaan gerakan pemerintah.

3.1.7 Kurikulum Terpadu

Pada tahun 2002 Pusat Pengembangan Kurikulum Depdiknas mengumumkan kurikulum berbasis kompetensi untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Pertama, kebaikan kurikulum ingin membuktikan potensinya sebagai instrumen kunci untuk mempertemukan pelayanan yang berbeda-beda dalam kerangka belajar sepanjang hayat yang berkelanjutan. Ini juga menunjukkan kesadaran yang jelas dari Depdiknas. Kebutuhan untuk merangkul macam-macam pelayanan yang berbeda-beda, bukan hanya secara administrasi tetapi juga secara mendidik. Ini merupakan indikasi tidak langsung bahwa Depdiknas siap untuk berperan sebagai pelaku pemimpin/pengarah dalam anak usia dini.

3.1.8 Pelatihan yang ditingkatkan

Bermacam-macam usaha telah dibuat untuk meningkatkan pelatihan pada pendidikan anak usia dini walaupun koordinasi secara lebih sistematis lebih disukai. Direktorat TK dan Sekolah Dasar sedang membuat usaha-usaha untuk mengembangkan sistem pengembangan profesional untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan guru-guru dan pengawas TK. Direktorat PADU juga telah menawarkan pada kerjasama dengan Forum dan Konsorsium PADU dalam inservice training untuk para pendidik Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain. Pelatihan Kader Posyandu dan BKB juga membuat kemajuan penting melalui Direktorat PADU, dengan ini penyampaian dua pelayanan sedang dilanjutkan.

3.1.9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000

Usaha terpadu negara mencapai suatu titik yang menentukan dengan diumumkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 28, undang-undang mengakui pendidikan anak usia dini sebagai langkah awal untuk pendidikan dasar. Lebih penting lagi disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini dapat disampaikan melalui cara formal, non formal dan informal, merangkul semua macam pelayanan yang ada di negara – TK, RA, KB, TPA, Posyandu dan BKB – dalam konsep PADU yang luas. Perpaduan ini dibawah konsep PADU meratakan cara dengan legal bagi Depdiknas untuk berperan sebagai agen/pelaku pemimpin pada anak usia dini, walaupun sedikit telah dikerjakan untuk menterjemahkan mandat implisit ini kedalam realita.

3.1.10 Melihat kedepan

Kemajuan ini luar biasa baik dalam jumlah maupun signifikannya. Dengan memperluas akses untuk pelayanan anak usia dini dengan cara meragamkan tempat-tempatnya adalah suatu tujuan yang diberikan oleh banyak negara, tetapi itu memberikan hasil yang kongkrit. Usaha untuk mendorong pendidikan orang tua ada dimana-mana tetapi sedikit negara-negara telah memenuhinya dengan pelayanan yang nyata. Rencana Aksi Nasional PUS mengenai anak usia dini diseluruh dunia tidak henti-hentinya menyebutkan pentingnya menggerakkan stakeholders yang bermacam-macam, tujuan yang sering dan kadang-kadang tidak memenuhi dengan respon yang hangat dilapisan bawah. Akhirnya, pelayanan dan sistem anak usia dini sepenuhnya ada diatas kertas dibanyak negara.

3.1.11 Sampai sekarang tantangan yang masih ada di Indonesia sama besarnya dengan kemajuan yang telah dibuat. Tantangan-tantangan ini harus dilihat sebagai hasil yang alami dari masalah baru dalam rangka membuat kemajuan. Bagian berikut meringkas beberapa tantangan utama yang perlu disampaikan untuk Indonesia untuk melanjutkan kemajuannya dalam pendidikan dan perawatan anak usia dini.

3.2 Masalah Kritis I : Partisipasi

3.2.1 Pembukaan

Partisipasi yang rendah dalam pelayanan anak usia dini adalah masalah dibanyak negara di dunia yang sedang berkembang, tetapi ini diungkapkan di Indonesia walaupun dengan perkiraan yang paling terbaik hati, tingkat partisipasi negara dalam pelayanan anak usia dini terutama dalam pelayanan pendidikan, salah satu yang terendah di dunia. Meskipun demikian seperti dibicarakan berikut ini kepelikan masalah telah ditutup-tutupi, walaupun dengan tidak hati-hati, dengan data partisipasi yang meningkat menggambarkan resiko dari kepuasan pemerintah yang terus menerus.

3.2.2 Akses yang tidak merata untuk pelayanan anak usia dini adalah masalah global lain dialami oleh banyak negara; termasuk Indonesia. Dengan proporsi tinggi yang ekstrim dari penyediaan swasta (99%) digabung dengan tingkat partisipasi yang ekstrim rendah, telah mengabadikan perbedaan antara kerugian dan keuntungan pada akses mereka terhadap pelayanan anak usia dini. Walaupun data penunjang sedikit tidak memuaskan, dan pemeriksaan kedalaman dan kealamiah masalah telah menjadi keanehan, mengganggu usaha untuk meningkatkan masalah ketingkat pembicaraan kebijakan.

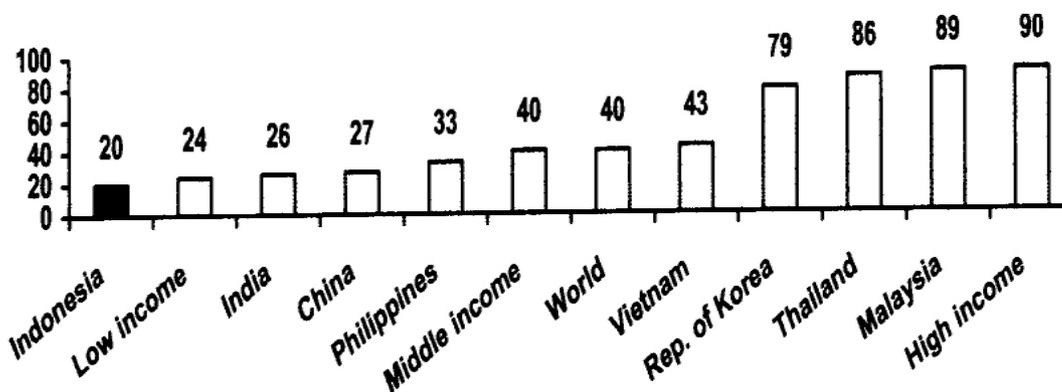
3.2.3 Akhirnya menurut Rencana Aksi Nasional PUS di Indonesia, TK dan RA akan terus berlanjut menjadi pelayanan utama dalam hal akses dan alokasi anggaran. Walaupun analisa tim review mengungkapkan bahwa kedua pelayanan pendidikan ini secara tepat bahwa kesenjangan ketidak setaraan yang paling besar dalam akses yang ada. Bagaimana pemerintah merencanakan untuk memperluasnya tanpa membatasi akses anak-anak yang tidak beruntung untuk mendapat kesempatan belajar bagi anak usia dini itu tidak jelas.

3.2.4 Bagian berikut mereview dan menganalisa masalah yang saling terkait yang perlu disampaikan dan dicarikan solusinya agar pemerintah mengembangkan rencana akses yang lebih valid.

3.2.5 Tingkat Pendaftaran

Menurut Rencana Aksi Nasional PUS tingkat partisipasi kasar di Indonesia untuk anak-anak yang berumur 4⁺ - 6⁺ Tahun pada pelayanan anak usia dini 15% pada tahun 2000. Indikator Perkembangan Dunia (tahun 2004) melaporkan angka lebih tinggi tingkat partisipasi kasar di Indonesia dalam pendidikan anak usia dini – 20% pada (tahun 2001-2002)¹³. Walaupun kemudian tingkat partisipasi yang baru-baru ini ketinggalan dari banyak negara-negara yang sedang berkembang (figur 2). Contoh: India dan Vietnam GDPnya perkapita lebih rendah dari Indonesia¹⁴ menunjukkan tingkat partisipasinya 26% dan 43% pada saat yang sama. Pada tingkat global negara-negara yang pendapatannya rendah rata-rata partisipasinya 24%, masih lebih tinggi dari Indonesia yang 20%.

Figur 2 tingkat partisipasi kasar dari pendidikan anak usia dini di negara-negara yang dipilih tahun 2001-2002



Source: World Development Indivators. (2004). The World Bank.

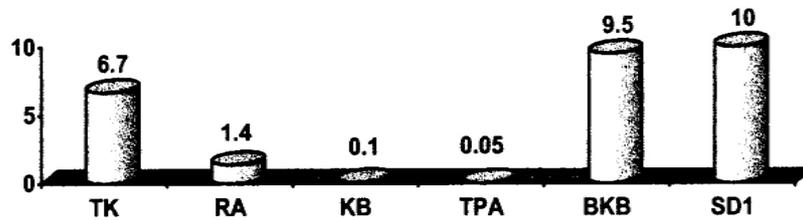
3.2.6 Sementara menurut Rencana Aksi Nasional PUS di Indonesia tingkat partisipasi kasar dari anak usia 0+ - 6+ tahun dalam pelayanan pendidikan anak Usia dini 28% pada (tahun 2001). Tingkat ini bisa menimbulkan perdebatan. Untuk sampai pada angka ini pemerintah memikirkan partisipasi di 6 (enam) pelayanan – TK, RA, KB,

¹³ Even Through the figure the world Development Indicators refers to pre-primary education, which concerns services catering for children over 3+ years, as the participation rate of children below 4+ years in Indonesia is almost negligible (figure 3), the figure is likely to refer to the participation rate of children over 4+ years in TK and RA.

¹⁴ The PPP GNI per capita of Indonesia in 2002 was \$3,070, compared with \$2,650 of India and \$2,300 of Vietnam. Source: World Development Indicators. (2004). The World Bank.

TPA, BKB dan kelas 1 di SD. Tetapi BKB adalah pelayanan untuk ibu-ibu bukan untuk anak-anak; dan SD kelas 1 adalah Pendidikan Dasar bukan Pendidikan Anak Usia Dini. Tanpa 2 pelayanan ini tingkat partisipasi menjadi turun sampai 8% (figur 3).

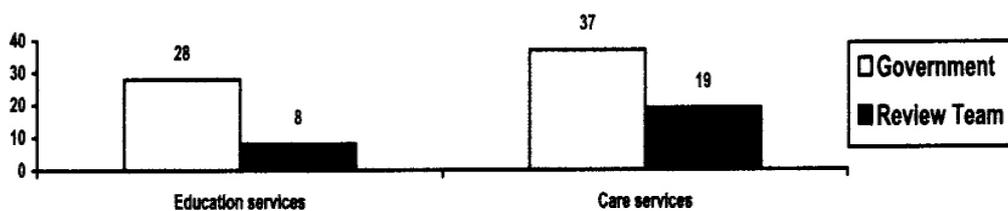
Figur 3 : Distribusi Tingkat partisipasi kasar di TK, RA, KB, TPA, BKB, dan SD kelas 1 pada tahun 2001



Source: National Plan of Action: Indonesia's Education for All. (2003). Jakarta: Proyek Pendidikan Luar Sekolah.

3.2.7 Suatu inflasi yang sama diteliti didalam kalkulasi tingkat partisipasi kotor dalam pelayanan perawatan. Tingkat pelayanan dilaporkan oleh Rencana Aksi Nasional PUS 37% (tahun 2001). Yang dimaksudkan didalam kategori pelayanan perawatan adalah Posyandu dan BKB. Selama 2 pelayanan ini targetnya orang tua, pada prinsipnya bukan diambil dari anak usia dini, tidak ada data partisipasi untuk anak usia dini. Walaupun umpamanya 37% diterima sebagai mandat partisipasi anak dalam pelayanan perawatan,¹⁵ jumlah angka untuk mengalihkan perhitungan menjadi double, selama kedua pelayanan itu disampaikan untuk kelompok ibu-ibu yang sama ditempat pelayanan yang sama. Dengan demikian angka-angka itu mungkin perlu disesuaikan sampai 19% (Figur 4).

Perbandingan tingkat partisipasi kasar baru-baru ini pada pelayanan perawatan dan pendidikan diperkirakan oleh pemerintah dan oleh tim review tahun 2001



3.2.8 Penyesuaian teknis yang serupa juga dibutuhkan untuk mencapai tingkat partisipasi yang ditargetkan untuk tahun 2015. Dalam Rencana Aksi Nasional PUS, tingkat partisipasi kasar yang ditargetkan untuk anak berusia 0+ -6+ tahun pada pelayanan pendidikan¹⁶ sampai tahun 2015 adalah 76%. Tetapi analisa rencana perluasan secara rinci untuk TK, RA, KB, dan TPA, pelayanan-pelayanan yang terlibat mengungkapkan bahwa bila pelayanan-pelayanan ini diperluas, tingkatnya akan menjadi 47%¹⁷, bukan 75% (Figur 5). Proyeksi pemerintah 75% mungkin telah

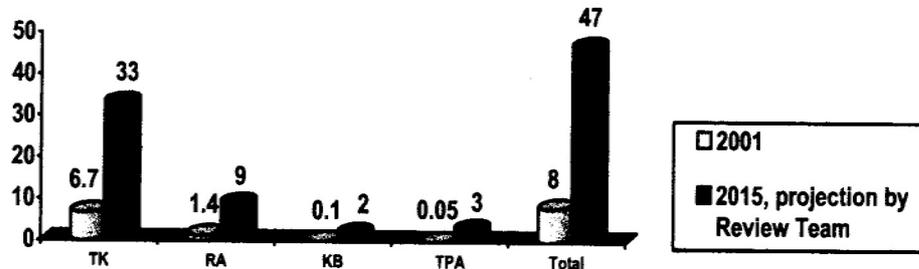
¹⁵ Child participation is inferred from the assumption that one mother participating in the Posyandu and BKB has one child at home

¹⁶ Data for care services (BKB and Posyandu) are not clear enough to estimate their exact expansion plans in terms of the number of service and children to reach

¹⁷ According to Indonesia's EFA Plan projections, there will be 10,252,640 children in TK, 2,971,500 in RA, 669,060 in KB, and 902,240 in TPA by 2015, when the total number of 0-6+-year-olds is projected at 31,300,931. The enrolment rate are calculated from these figures.

memasukan partisipasi pada BKB dan SD juga; tetapi seperti didiskusikan sebelumnya pelayanan ini tidak digabung dengan pelayanan lain untuk menghitung tingkat partisipasi.

Figur 5 : Tingkat partisipasi kasar yang diproyeksikan yang terbaru untuk anak usia 0+ - 6+ tahun dalam pelayanan pendidikan tahun 2001 dan 2015

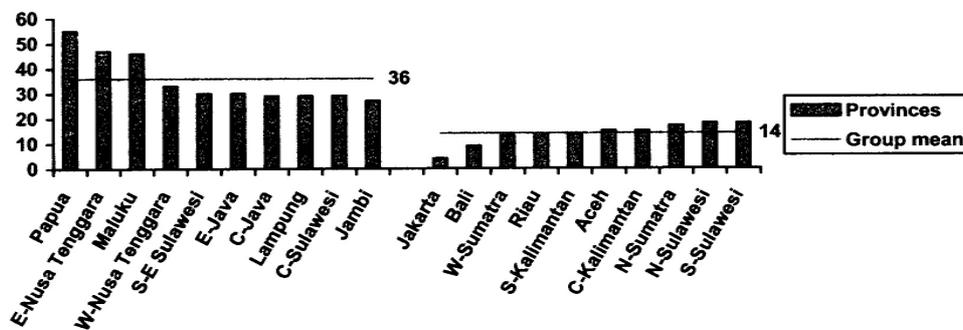


Source: National Plan of Action: Indonesia's Education for All. (2003). Jakarta: Proyek Pendidikan Luar Sekolah

3.2.9 Ketidak merataan

Untuk memeriksa ketidak merataan akses daerah, sepuluh provinsi yang teratas dengan tingkat kemiskinan yang paling rendah (Kaya-10) dan 10 provinsi yang terbawah dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi (Miskin-10) diidentifikasi. Tingkat kemiskinan bagian tengah dari Kaya – 10 adalah 14% dibandingkan dengan 36% untuk Miskin – 10 (Figur 6)

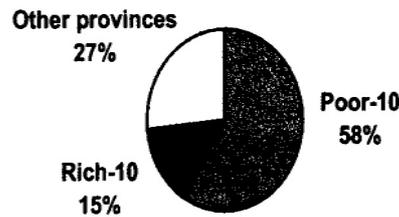
Figur 6 : Tingkat kemiskinan dari provinsi Kaya – 10 dan provinsi Miskin – 10 tahun 1999



Source: United Nations. (2001). Common Country Assessment for Indonesia. Jakarta: United Nations.

3.2.10 Miskin – 10 58% dari penduduk negara miskin dibandingkan ke 15% untuk Kaya – 10 (Figur 7)

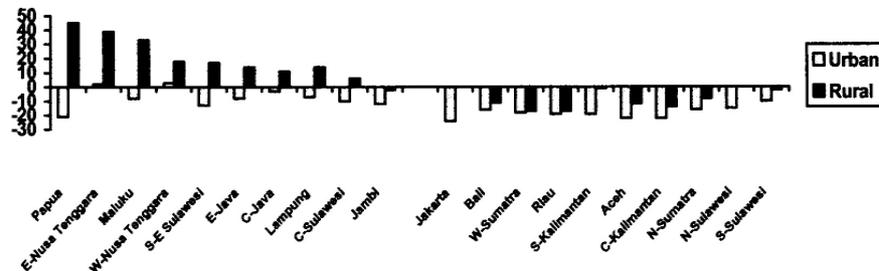
Figur 7: Distribusi Orang Miskin – 10, Kaya – 10 dan provinsi lain



Source: United Nations. (2001). Common Country Assessment for Indonesia. Jakarta: United Nations.

3.2.11 Satu dari perbedaan yang ditemukan antara Miskin – 10 dan Kaya – 10 adalah kesenjangan kemiskinan kota – pedesaan jauh lebih besar antara Miskin – 10, sedangkan antara Kaya-10 baik di pedesaan dan perkotaan mempunyai tingkat kemiskinan dibawah tingkat nasional (Figur 8). Ini dikarenakan sebagian besar kemiskinan yang ekstrim dipedesaan dari provinsi yang miskin seperti Papua, Nusa Tenggara dan Maluku. Menurut latar belakang laporan ini , sementara daerah perkotaan cenderung membaik selama krisis ekonomi tahun 1998, indeks kemiskinan dipedesaan masih tetap diatas tingkat sebelum krisis. Ini menunjukkan kemiskinan yang mengerikan di pedesaan merupakan faktor utama membuat Miskin-10 berlawanan dengan Kaya-10.

Figur 8 : Tingkat kemiskinan kurang dari rata-rata nasional pada provinsi Miskin-10 dan Kaya-10 tahun 2001

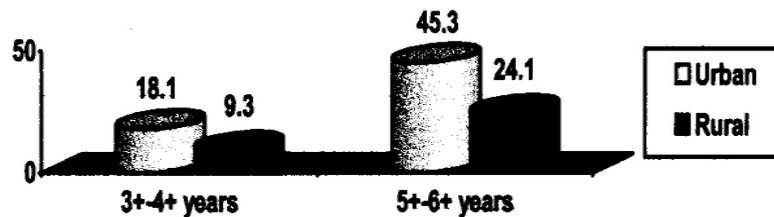


Source: World Bank Report, 23028-IND. (2001). The World Bank.

3.2.12 Dengan kurangnya data partisipasi yang tidak dijumlah untuk daerah perkotaan – pedesaan, sukar ditentukan berapa banyak perbedaan regional dalam kemiskinan yang termuat kedalam perbedaan akses. Tetapi dengan mempertimbangkan bahwa 71% dari Taman Kanak-Kanak yang membayar walaupun di daerah pedesaan, dan 64% Taman Kanak-Kanak yang membayar extra untuk makanan dan biaya lain. Tidak sukar untuk membayangkan kesenjangan akses yang signifikan antara kaya dan miskin terutama pada pelayanan pendidikan anak usia dini yang membayar.

3.2.13 Data dibawah, dicantumkan dalam latar belakang laporan sebagian membuktikan masukan-masukan ini. Walaupun pelayanan disurvei tidak diidentifikasi, diberikan kelompok usia, data kelihatannya mengacu pada pelayanan pendidikan. Ini kelihatannya diantara usia 3+ - 4+ tahun, anak-anak perkotaan 100% kelihatannya mendaftar pada pelayanan anak usia dini dibandingkan dengan mereka yang didaerah Pedesaan. Kesenjangan menyempit diantara anak-anak yang lebih tua tetapi masih terungkap.

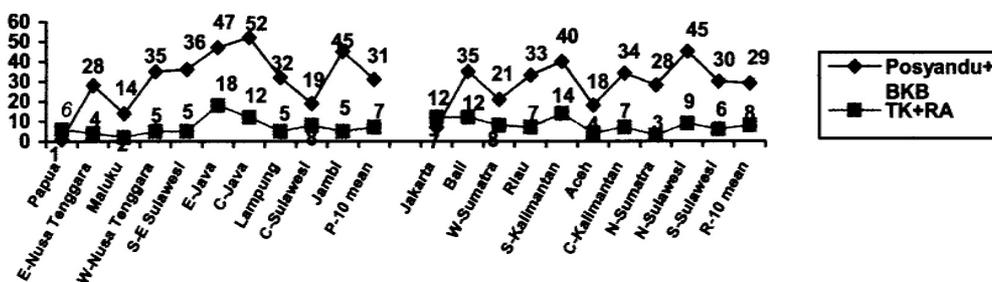
Figur 9 : Partisipasi kasar pada pelayanan anak usia dini menurut daerah



Source: Susenas (2003)

3.2.14 Sementara kesenjangan yang besar antara perkotaan dan pedesaan, kesenjangan regional antara orang yang Miskin-10 dan orang yang Kaya-10 dalam partisipasinya pada pelayanan anak usia dini kurang jelas. Kesenjangan regional muncul hanya ketika perbandingannya diperkecil kebawah untuk 5 daerah yang paling Miskin (Papua, NTT, Maluku, NTB dan Sulawesi Tenggara) dan 5 yang paling Kaya (Jakarta, Bali, Sumatera Barat, Riau dan Kalimantan Selatan) dalam hubungan TK dan RA, kedua pelayanan pendidikan untuk anak usia dini yang utama ini (Figur 10). Kemudian tingkat rata-rata/medium dari Miskin-5 menjadi 4% dibandingkan dengan 11% untuk Kaya-5 mengungkapkan perbedaan utama tetapi walaupun fokusnya dipersempit. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada perbedaan yang besar seperti itu ditemukan pada Posyandu dan BKB, pelayanan perawatan : tingkat partisipasi kasar medium atau pertengahan untuk Miskin-5 pada pelayanan-pelayanan ini adalah 23%, dibandingkan dengan 27% untuk yang Kaya-5 kelihatannya bahwa pendapatan tidak dapat menjadi faktor signifikan dalam partisipasi pada pelayanan perawatan.

Figur 10 : partisipasi kasar dari anak usia 0 +- 6+ tahun dipelayanan perawatan dan pelayanan pendidikan di provinsi Miskin-10 dan provinsi Kaya-10 tahun 2001

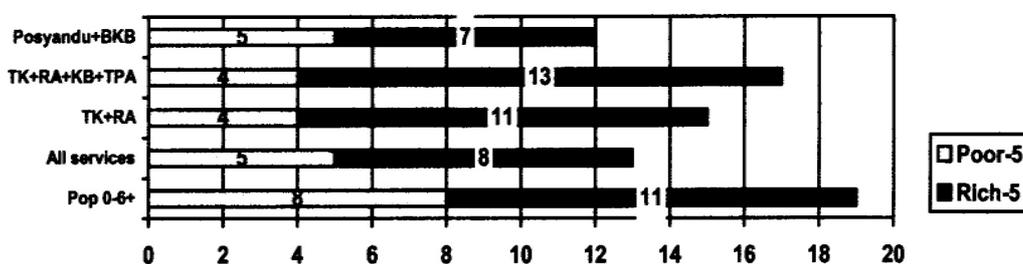


source: National Plan of Action: Indonesia's education for All. (2003). Jakarta: Proyek Pendidikan Luar Sekolah.

* Care services includes Posyandu and BKB; and here, the education services refer to TK and RA only

3.2.15 Distribusi pelayanan regional mengikuti pola yang sama : kesenjangan ditemukan pada pelayanan pendidikan, bukan pada pelayanan perawatan. Orang yang Kaya-5 punya andil sedikit lebih besar dari pelayanan relatif keandil mereka pada anak kelompok usia 0+ - 6+ tahun (Figur 11). Tetapi ketika ini menjadi hanya pelayanan pendidikan, terutama ketika semua 4 pelayanan pendidikan anak usia dini – TK, RA, KB, dan TPA dianggap bersama-sama, kesenjangan provinsi-provinsi Kaya dengan 5 provinsi Miskin melebar dengan signifikan. Orang yang Kaya-5 mempunyai 11% dari kelompok usia 0+ - 6+ tahun mempunyai 13% pelayanan pendidikan anak usia dini, sementara orang miskin-5 punya 18% kelompok usia 0+ - 6+ tahun hanya 4% dari jumlah semuanya. Tidak ada perbedaan regional yang jelas seperti itu diobservasi dalam distribusi pelayanan perawatan.

Figur 11 : Distribusi populasi anak umur 0+ - 6+ tahun dan pelayanan perawatan dan pendidikan bagi provinsi Miskin-5 dan Provinsi Kaya-5 tahun 2001



source: National Plan of Action: Indonesia's education for All. (2003). Jakarta: Proyek Pendidikan Luar Sekolah.

* Calculated from data presented in the EFA Plan

3.2.16 Dua aplikasi dapat digambarkan dari observasi ini. Pertama, kesenjangan akses utama antara anak-anak yang beruntung dan tidak beruntung di Indonesia ada di akses mereka untuk pelayanan pendidikan anak usia dini. Pelayanan perawatan (contohnya Posyandu dan BKB) di distribusi dan di akses lebih merata. Sementara partisipasi pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak diabaikan, sehingga kesenjangan pelayanan pendidikan anak usia dini menurun sampai apa yang terlihat pada Taman Kanak-Kanak dan Raudathul Athfal.

3.2.17 Kedua, ketidak merataan regional pada anak usia dini di Indonesia terkonsentrasi pada beberapa provinsi yang benar-benar miskin dihubungkan dengan provinsi yang benar-benar kaya. Sedikit ada diantara ketidakadilan mayoritas menunjukkan dalam provinsi-provinsi tersebut. Ini harus dilakukan dengan fakta bahwa tingkat partisipasi yang sedang berlaku, terutama pelayanan pendidikan anak usia dini begitu rendah-8%. Menurut penilaian tim review bahwa perbedaan ditemukan hanya antara provinsi-provinsi tersebut dimana kebanyakan jumlah-jumlah kecil pelayanan ditemukan dan dimana tidak ada sama sekali pelayanan tersedia.

3.2.18 Tantangan

Suatu dilema dihadapi pemerintahan manapun yang perlu meningkatkan partisipasi pelayanan pendidikan anak usia dini. Ini karena perluasan pelayanan pendidikan yang membayar dapat berdampak merugikan untuk memperlebar jenjang akses. Sebagai alternatif, seandainya Indonesia, pemerintah dapat melanjutkan memperkuat fungsi pelayanan perawatan dan pendidikan informal seperti Posyandu dan BKB daripada memperluas pelayanan formal dan nonformal yang berbasis pusat (contoh TK, .RA,

KB, TPA). Tapi kegiatan pendidikan tambahan pada pelayanan-pelayanan ini tetap dibutuhkan kenaikan pembayaran seperti kasus yang dialami Taman Posyandu, yang mengakibatkan masalah yang sama – anak-anak Miskin tidak mampu berpartisipasi. Dinyatakan secara tidak langsung bahwa tujuan meningkatkan akses anak miskin untuk pelayanan anak usia dini terutama pada pelayanan pendidikan sukar untuk dicapai dengan merata tanpa investasi pemerintah.

3.2.19 Bisa dipahami bahwa Direktorat TK dan SD dalam proses mengembangkan berbagai bentuk TK yang didesain untuk kondisi khusus anak-anak miskin (Contohnya TK satu atap). Tetapi karena tidak adanya informasi yang akurat mengenai berapa banyak anggaran keseluruhan direncanakan untuk perluasan TK akan diperuntukan untuk pelayanan ujicoba ini untuk anak-anak miskin, atau berapa banyak perluasan partisipasi yang direncanakan akan terjadi melalui pelayanan ujicoba ini, sedikit dapat dikatakan dari efek akhir mengenai pemerataan. Pemerintah hanya dapat di desak untuk meneliti aspek ini dari Rencana Aksi Nasional PUS untuk mengukur ketidak rataan yang efektif dan valid.

3.3 Masalah Kritis II : Investasi.

3.3.1 Pembukaan

Pembahasan mengenai sumber-sumber untuk pendidikan anak usia dini di Indonesia melibatkan penilaian (assessment) pola terbaru tentang pengeluaran dalam hubungan anak usia dini yang sesuai dengan target yang diinginkan oleh negara. Penilaian ini dihambat oleh kekurangan data yang relevan (biaya dari tipe program yang berbeda-beda pengeluaran dari bermacam-macam pelayanan proporsi anggaran nasional yang diperuntukan untuk anak usia dini dll). Walaupun demikian data yang tersedia dapat dipergunakan untuk menilai kecukupan sumber-sumber untuk permulaan tahun kehidupan. Dalam paragraf berikut masalah ini diangkat pertama. Tim review mengambil kesimpulan bahwa sumber-sumber untuk pendidikan dan perawatan anak usia dini di Indonesia secara signifikan tidak cukup. Kesimpulan ini mengarah paling tidak ke empat pertanyaan kebijakan yang akan didiskusikan sebagai berikut:

- Berapa jumlah optimal investasi
- Bagaimana menggerakkan sumber-sumber yang diinginkan; terutama berapa dana yang harus berasal dari pemerintah dan berapa dana yang berasal dari sektor swasta
- Kemana sumber-sumber dana itu harus diarahkan atau siapa yang diuntungkan oleh dana itu
- Bagaimana membuat investasi bisa berjalan sejauh mungkin, yaitu bagaimana membuat efisiensi biaya.

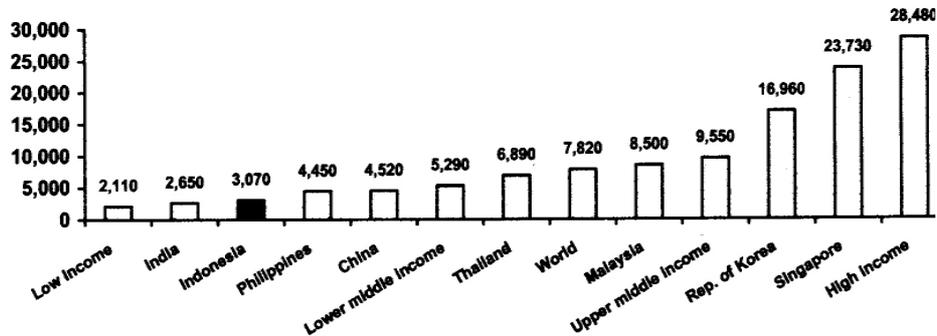
3.3.2 Penggunaan sumber-sumber dana yang sekarang¹⁸

Kinerja masyarakat Indonesia untuk indikator sosial ekonomi menyediakan konteks yang bermanfaat untuk penilaian sumber-sumber dana yang digunakan PPP GNI income per kapita Indonesia \$3,070 (2002) yang menempatkan dirinya antara negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah bawah. Figur 12 menunjukkan posisinya

¹⁸ See Tables 2,3,7 and 8 in Annex 3

relatif diantara kelompok negara-negara yang dipilih dimana Indonesia bisa membandingkan dirinya.

Figur 12 : Income nasional kotor PPP per kapita (\$) , 2002

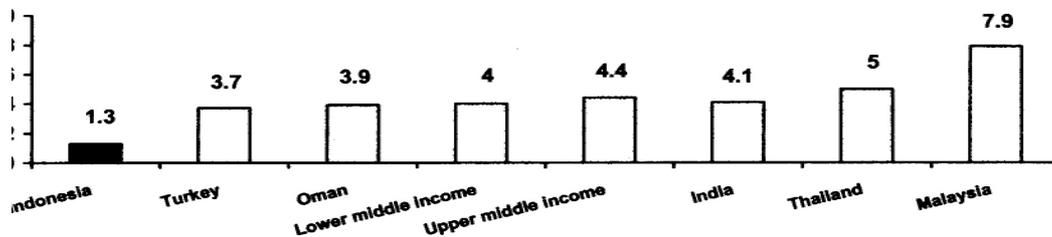


Source: World Development Indicators. (2004). The World Bank

3.3.3 Tingkat pertumbuhan tahunan perkapita GDP Indonesia selama 10 tahun terakhir (1990-2002) telah mengecewakan 2,1% dibanding dengan India 4, 0%, Malaysia 3,6% dan Thailand 2,9% . Tetapi ada pertumbuhan income perkapita masa-masa ini yaitu pertumbuhan ekonomi melebihi pertumbuhan penduduk. (1.1%)

3.3.4 Setelah diberikan tingkat income kinerja Indonesia dalam sektor pendidikan menjadi rendah menghabiskan paling sedikit 1.3% dari GDP, diantara negara-negara yang ditunjukkan dalam figur 13

figur 13 : Pengeluaran pada sektor pendidikan, seperti % GDP, 2001-2002

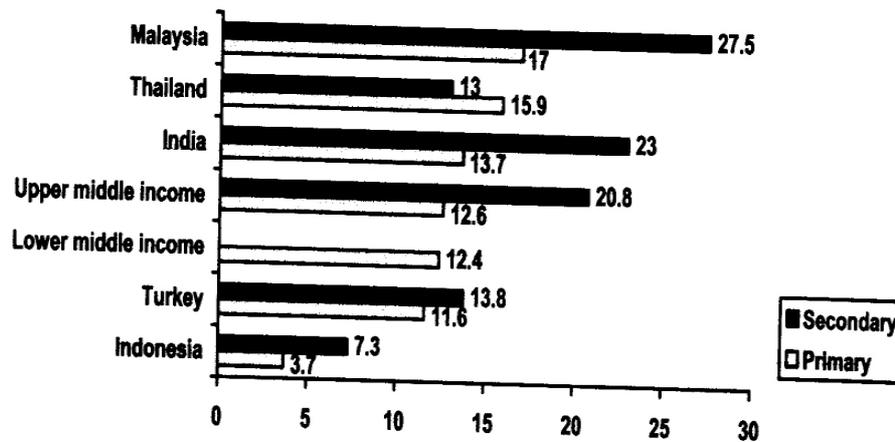


Source: World Development Indicators. (2004). The World Bank

3.3.5 Dari semua pengeluaran, jumlah yang diperuntukan untuk anak usia dini sangat kecil. Jumlah pengeluaran untuk pendidikan dan perawatan anak usia dini di Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 berjumlah Rp. 123.72 milyar, ¹⁹ yaitu hanya 0,55% dari anggaran pendidikan. Kekurangan data membuat keragu-raguan tentang kelayakan perbandingan dengan negara lain. Walaupun demikian setelah dibandingkan pengeluaran pendidikan dasar diseluruh negara (figur 14) dengan wajib belajar 9 tahun seperti yang ditetapkan sebagai prioritas Indonesia sekali lagi kelihatan dibawah, yang mengarah perkiraan bahwa pengeluaran untuk anak usia dini masih lebih rendah.

¹⁹ Background Report, table 27.

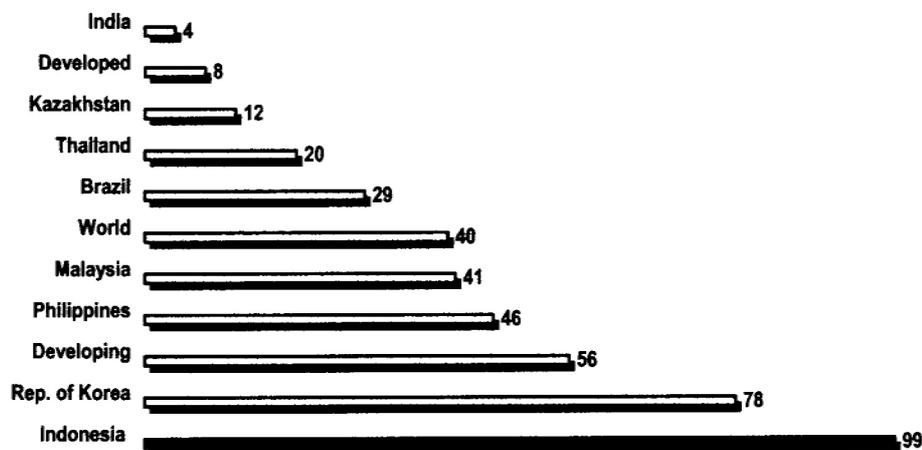
Figur 14 : Pengeluaran negara per siswa untuk pendidikan dasar dan lanjutan di negara-negara yang dipilih seperti % GDP per kapita, tahun 2001-2002.



Source: World Development Indicators. (2004). The World Bank

3.3.6 Sumber data keuangan kurang, tetapi memikirkan Indonesia secara fenomena proporsi tinggi dari partisipasi swasta pada pendidikan anak usia dini (figur 15), dan fakta bahwa pelayanan swasta semuanya membayar, satu dapat dengan mudah disimpulkan bahwa pada dasarnya orang tua yang membayar pendidikan anak usia dini.

Figur 15 : Partisipasi swasta pada pendidikan anak usia dini seperti % dari total, 2000



Source: EFA Global Monitoring Report. (2003). Paris: UNESCO Publishing.

3.3.7 Seperti pertanyaan tadi siapa yang memanfaatkan dana itu seperti yang diungkapkan pada figur 11, pelayanan pendidikan anak usia dini tidak sepadan disesuaikan kekelompok income lebih tinggi di daerah perkotaan, sementara disana lebih merata distribusi pelayanan perawatan untuk ibu-ibu-Posyandu dan BKB.

3.3.8 Dalam jumlah, investasi keseluruhan di Indonesia dibidang pendidikan kecil dibandingkan dengan negara-negara lain lebih kecil lagi di pendidikan anak usia dini yang pelayanan utamanya disiapkan hampir 100% oleh sektor swasta. Yang paling utama diuntungkan dari pelayanan inti anak usia dini terutama pendidikan, anak-anak dari kelompok income yang tinggi. Tidak adanya investasi negara masih merupakan

hambatan utama untuk menjembatani kesenjangan akses antara mereka yang beruntung dan yang tidak beruntung (miskin).

3.3.9 Latar belakang investasi yang lebih besar

Masalah investasi yang lebih besar pada Pendidikan Anak Usia Dini didasarkan oleh beberapa pertimbangan dari perkembangan pribadi ke masalah sosial dan keuntungan ekonomi untuk masyarakat, yang diperagakan dibawah secara beruntun. Penyediaan Pendidikan Anak Usia Dini memegang kunci untuk pemersatu dan pemerataan masyarakat. Masalah investasi yang lebih besar di Indonesia berdasarkan hal-hal diatas mengenai visi strategi Indonesia mempunyai tujuan bagaimana meletakkan posisinya dalam sikap hormat suatu bangsa di tahun-tahun yang akan datang.

3.3.10 Riset yang baru dilaksanakan mengenai perkembangan otak menyediakan bukti-bukti bahwa potensi otak menyarankan bahwa potensi otak dapat ditingkatkan bahkan kapasitas Fisiologi melalui simulasi yang sesuai, interaksi dengan anak-anak, dan kesempatan untuk peningkatan semacam itu paling lambat mulai sekitar usia 3 tahun. Eksploitasi kesempatan semacam ini membutuhkan investasi dalam menyiapkan lingkungan yang menstimulasi untuk anak usia dini. Studi juga menunjukkan bahwa intervensi kualitas pada tahun-tahun permulaan punya dampak positif pada pengembangan kognitif anak-anak. Disamping itu riset telah mendokumentasi akibat-akibat yang bermanfaat pada perkembangan pribadi anak dalam hal pengaturan emosi, kapasitas untuk berpartisipasi dalam kelompok dan kesiapan masuk sekolah.

3.3.11 Menurut beberapa studi menyebutkan bahwa perkembangan tingkat individu semacam itu dapat meningkatkan keuntungan sosial dari intervensi awal. Dengan memperhitungkan dampak pada kesehatan, tingkat kesalahan, pemberantasan kemiskinan, kontribusi terhadap warga negara yang lebih baik dan keserasian dan keuntungan sosial lain, keadilan yang dipublikasikan oleh Robert Lynch Study²⁰ memperkirakan bahwa keuntungan jangka panjang sampai tahun 2050 dapat dinilai sebanyak 151 milyar dolar untuk Amerika. Tanpa mengabaikan perkiraan semacam itu dan memikirkan bahwa itu dapat berbeda tergantung negara masing-masing. Alasan sosial itu sendiri menyebabkan hal yang memaksa untuk investasi pada intervensi anak usia dini untuk negara semacam Indonesia karena ketidak merataan sosial dan ekonomi yang ditetapkan dalam emosi awal. Salah satu yang paling baik didokumentasikan dari semua fenomena sosial yaitu perampasan awal dalam hidup sangat tinggi berhubungan dengan income lebih rendah kemudian adanya ketidakuntungan sosial. Cara yang paling efektif bagi masyarakat untuk memberhentikan lingkaran yang ganas ini ditujukan pada resiko-resiko yang mempersatukan sosial dengan penanggulangan lebih awal. Lynch Study merupakan ilustrasi grafik dari keuntungan sosial pemerintah dapat diambil dari intervensi awal.

3.3.12 Study yang sama memperkirakan bahwa setiap dolar yang di investasikan dalam kualitas intervensi anak usia dini menghasilkan 3 dolar dalam bentuk keuntungan pada pemerintah. Study Kanada²¹ menghitung perbandingan keuntungan dan biaya 2: 1 pada waktu kualitas pelayanan untuk anak usia dini disediakan untuk semua usia 2+ - 6+ tahun. Selama rasio / perbandingan 1:1 dianggap sebagai investasi yang bagus, 3 : 1

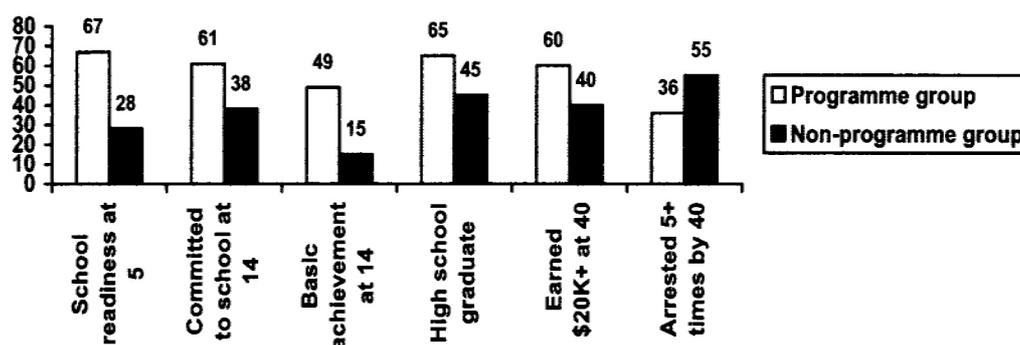
²⁰ Lynch, R. (2004) Exceptional Returns: Economic, fiscal, and Social benefits of Investment in Early Childhood Development. Washington: Economic Policy Institute

²¹ Cleveland, G., & Krashinsky, M. (1998) The Benefits and Costs of Good Childcare: The Economic Rationale for Public Investment in Young Children. Toronto: University of Toronto.

rasio keuntungan dan biaya adalah investasi yang sangat bagus untuk negara, diukur dalam murni istilah ekonomi. Studi memperkirakan keuntungan besar baik untuk pembayar pajak maupun pemerintah bila semua dari 20% dari usia 3+ - 4+ tahun pada keluarga miskin yang tidak beruntung dari pendidikan anak usia dini dan pelayanan perawatan disiapkan dengan pelayanan-pelayanan semacam itu. Hasil menjadi positif selama lebih dari 17 tahun; sampai 25 tahun akan ada surplus besar-besaran untuk biaya sampai kira-kira \$31 milyar : setelah 50 tahun, surplus berjumlah sampai \$61 milyar.

3.3.13 Review yang baru-baru ini High/Scope Perry Preschool Study setelah 40 tahun mengikuti mengungkapkan keuntungan bersih yang tidak tersaingi dari program anak usia dini.²² Anak-anak yang masuk program pendidikan anak usia dini lebih siap untuk sekolah pada umur 5 tahun; lebih menjanjikan terhadap kerja sekolah pada umur 14 tahun; kemungkinan menunjukkan hasil sekolah yang lebih bagus pada umur 14 Tahun; kemungkinan untuk tamat dari SMA lebih banyak, kemungkinan punya penghasilan lebih dari US\$20,000 pada umur 40 tahun; dan kemungkinan tidak banyak yang dipenjara karena kriminal sampai umur 40 tahun. Jumlah yang kembali US\$13 dari setiap dolar yang dihabiskan untuk program anak usia dini.

Figur 16 : Temuan utama High/Scope Perry Preschool Study sampai umur 40 tahun, % 2004



Source: Schweinhart, L., & Montie, J. (2004, November 17). High/Scope Perry Preschool Study Through Age 40. Presentation at the World Bank.

3.3.14 Dengan demikian bukti pemaksaan yang ada dari keuntungan yang banyak dari intervensi awal. Tentunya keuntungan ini jangka panjang, dan pemerintah harus membuat inisiatif melaksanakan kebijakan untuk jangka pendek. Tetapi jika Indonesia serius mengenai perkembangan dan perpaduan sosial jangka panjang, pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi perlu dipikirkan membuat investasi lebih besar pada pelayanan anak usia dini.

3.3.15 Masalah untuk investasi lebih besar bahkan lebih memaksa kinerja Indonesia dibanding dengan negara-negara lain dalam hal ekonomi dan indikator sosial. Investasi Indonesia dalam sektor pendidikan secara keseluruhan sangat kecil, dan dalam sektor ini investasi pada usia awal hampir semuanya dibiayai oleh sektor swasta. Sebaliknya keuntungan ekonomi dan sosial diatas merupakan argumentasi kuat bagi negara dan

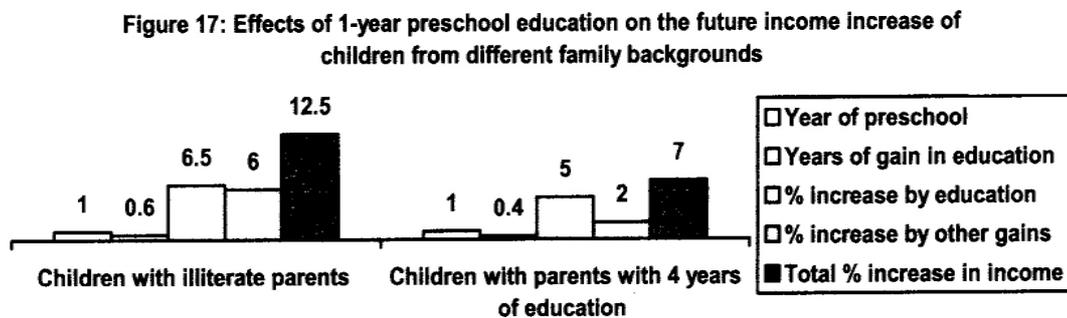
²² Schweinhart, L., & Montie, J. (2004, November 17). High/Scope Perry Preschool Study Through Age 40. presentation at the World Bank. The Study followed up 123 young African-American children living in poverty who attended the High/Scope Perry Preschool Programme. See www.highscope.org/Research/PerryProject/perrymain.htm

bukan dari investasi swasta. Sebagai tambahan, beberapa keuntungan sosial seperti kepaduan sosial, dapat diambil hanya melalui investasi negara : terlalu banyaknya investasi swasta bahkan dapat mengurangi kepaduan sosial jangka panjang dengan memperdalam kesenjangan antara kaya dan miskin.

3.3.16 Ini dikarenakan studi juga menunjukkan bahwa keuntungan dari Pendidikan Anak Usia Dini jauh lebih besar bagi orang miskin. Anak-anak dari keluarga kaya punya keuntungan dari awal dari rumah mereka yang meninggalkan ruangnya lebih kecil untuk keuntungan yang dicapai dari kehadiran pada pelayanan anak usia dini. Anak-anak miskin dilain pihak tidak punya pembelajaran optimal dan lingkungan yang berkembang dirumah untuk memulai. Apa yang disediakan dan dialami pada pelayanan anak usia dini bila mereka mempunyai akses dan sering hanya merupakan satu-satunya input yang mereka punya untuk pembelajaran dan perkembangan awal.

3.3.17 Figur 17 menunjukkan margin keuntungan yang lebih besar dari pendidikan anak usia dini untuk anak-anak yang paling miskin sekalipun. Satu tahun pendidikan anak usia dini dengan menggambarkan orang tua meningkatkan pendapatan/penghasilan masa depan mereka sampai 12,5% : pengalaman yang sama menghasilkan hanya 7 % peningkatan diantara anak-anak yang orang tua mereka punya pendidikan 4 tahun. Dengan demikian dampak potensial dari pelayanan anak usia dini pada kehidupan anak-anak lebih besar dengan anak-anak dari latar belakang keluarga miskin.

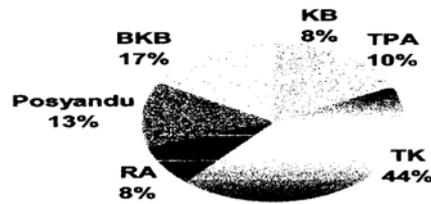
Figur 17 : Akibat dari pendidikan anak usia dini satu tahun pada peningkatan penghasilan masa depan dari anak-anak yang latar belakang keluarganya berbeda.



Source: Hart, B., & Risley, T. (1995). Meaningful Differences in Everyday Experiences of young American Children. Baltimore: Brookes

3.3.18 Dari pandangan ini penting dipelajari secara seksama bagaimana Rencana Aksi Nasional PUS untuk berinvestasi di TK dan RA yang mengurangi 52% investasi pemerintah untuk anak usia dini sampai 2015 (Figur 18) akan menguntungkan orang miskin. Bila digabung Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak, keempat pelayanan pendidikan akan menutupi 70% anggaran yang diproyeksikan, serta 30% untuk pelayanan orang tua. Tapi inilah pelayanan pendidikan dimana jenjang ketidakadilan paling besar yang sekarang ditemukan. Akibatnya adalah tanpa ukuran jelas untuk mengarahkan investasi ini kepada orang miskin, kesenjangan yang tidak merata akan bertambah lebar bahkan untuk masa depan.

Figur 18 : Distribusi biaya yang diproyeksikan untuk KB, TPA, TK, RA, Posyandu dan BKB sampai 2015



Source: National Plan of Action: Indonesia's Education for All. (2003). Jakarta: Proyek Pendidikan Luar Sekolah

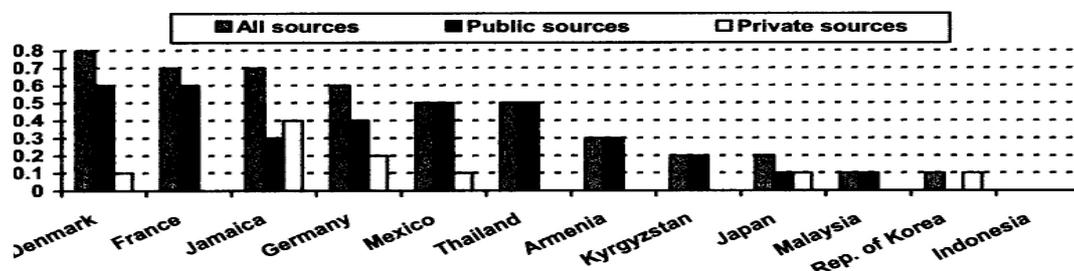
3.3.19 Mobilisasi Sumber-sumber (Dana)

Semua pembahasan diatas mengarah kepada kesimpulan yang jelas bahwa lebih banyak sumber-sumber dibutuhkan, yang sebaliknya menimbulkan dua pertanyaan yang berhubungan: Berapa banyak lagi untuk di investasi dan dimana hendak mencari sumber-sumber yang dibutuhkan.

3.3.20 Yang berhubungan dengan pertanyaan pertama bila penyediaan kualitas dibuat universal, biaya bisa dihitung secara sederhana dengan mengalihkan target kuantitatif dengan unit cost yang diperkirakan untuk meningkatkan kualitas. Apakah investasi skala ini akan layak atau sesuai dengan yang diinginkan itu adalah masalah lain. Sebagai kelayakan adalah pertanyaan untuk pengambil kebijakan tingkat nasional, disini pembahasan diarahkan kepada masalah yang diinginkan.

3.3.21 Pertanyaan berapa banyak investasi pada anak usia dini yang diinginkan bisa dijawab secara tidak langsung dengan memeriksa kinerja negara-negara lain. Menurut figur 19 pada tingkat global jumlah pengeluaran pada pendidikan anak usia dini seperti presentase dari GDP bervariasi dari 0,8% di Denmark dapat ditiadakan di Indonesia. Di Denmark dan Perancis kebanyakan pengeluaran berasal dari sumber-sumber pemerintah : Mexico dan Thailand juga sama dengan kategori ini. Sementara semua Republik Korea pengeluarannya amat kecil berasal dari sumber-sumber swasta. Zamaika dimana investasi swasta relatif tinggi.

Figur 19 : Pengeluaran pada pendidikan anak usia dini dilembaga / Administratif seperti % dari GDP, 2001



Source: UNESCO Institute of Statistics. (2004) Global Education Digest. Montreal: UNESCO Institute of Statistics

3.3.22 Armenia merupakan perhatian khusus bagi Indonesia karena tingkat perbandingannya dari perkembangan ekonomi. Armenia yang income per kapita PPP GNI pada tahun 2002 \$3,230 sedikit lebih tinggi dari \$3,070 dari Indonesia menghabiskan 0.3% dari GDPnya pada pendidikan anak usia dini berasal sepenuhnya dari sumber-sumber pemerintah (publik). Sementara Kyrgyzstan yang income per kapita PPP GNI tahun 2002 \$1,560 menghabiskan 0,2% dari GDP untuk pendidikan anak usia, sekali lagi berasal dari 100% sumber-sumber pemerintah. Dari pandangan ini Indonesia pengeluarannya perlu ditambah paling tidak 0.1% , tingkat yang dipertahankan oleh negara-negara lain dimana investasi pemerintah sedikit ditemukan (misalnya Republik Korea) atau sampai 0,2%, tingkat yang dipertahankan oleh negara-negara yang tingkat perkembangannya bahkan lebih rendah dari Indonesia adalah Kyrgyzstan, atau bahkan lebih baik sampai 0,3% tingkat yang dipertahankan oleh negara-negara yang perkembangannya sebanding dengan Indonesia²³

3.3.23 Seperti pertanyaan bagaimana mendapat sumber-sumber dana yang dibutuhkan dalam sektor pendidikan,²⁴ penting untuk dicatat bahwa sektor pendidikan Indonesia secara keseluruhan pendanaannya kurang, dan prioritasnya itu untuk mencapai pendidikan wajib belajar 9 tahun tidak termasuk pendidikan anak usia dini. Dalam situasi ini tanpa kesadaran yang meningkat betapa pentingnya anak usia dini ada sedikit ruang untuk merelokasikan dana untuk anak usia dini dari subsektor pendidikan yang lain. Semua anggaran pendidikan harus dinaikkan.

3.3.24 Sementara penggunaan sumber-sumber dana yang sekarang dapat dibuat lebih efisien. Pertama walaupun datanya sukar untuk dipahami bukti yang bersifat anekdot menyarankan bahwa tidak pentingnya sebagian besar pendanaan anak usia dini dihabiskan pada manajemen birokrasi ketimbang dari pada penyampaian program. Beberapa interview menyarankan bahwa porsi besar digunakan pada tingkat pemerintah pusat. Tidak mungkin untuk membuat rekomendasi yang kuat dalam ketidak adanya data yang kuat tapi apa yang dapat dikatakan disini bahwa pengambil kebijakan nasional harus mencoba untuk mengidentifikasi contoh-contoh penghambat birokrasi yang bisa dipotong seperti prosedur inspeksi yang banyak tumpang tindih.

3.3.25 Yang kedua tidak perlu mengatur ulang standar kualitas terutama untuk pelayanan-pelayanan yang dibiayai oleh donor external. Pusat padu, dibuat sebagai bagian dari proyek Bank Dunia misalnya dilengkapi peralatan yang bagus, nyaman tetapi fasilitas yang dikunjungi oleh tim review pemanfaatannya rendah. Salah satu pusat pelayanan dibangun untuk 130 anak-anak sementara jumlah maksimum anak-anak yang dapat datang kepusat pelayanan itu dari masyarakat hanya 80 anak.

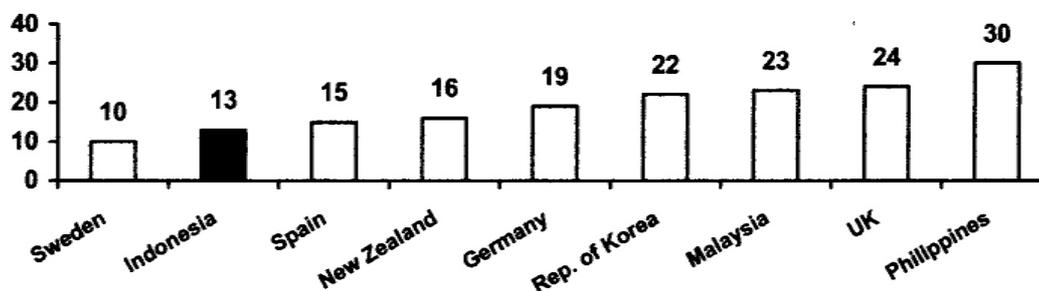
3.3.26 Hal yang ekstrim perbandingan guru – siswa rendah pada pendidikan anak usia dini. Ini hal lain yang harus diteliti di Indonesia perbandingan siswa dan guru 13 salah satu yang terendah dari negara-negara yang ada dibawah ini (figur 20) yang income per kapita PPP GNI jauh diatas dari pada Indonesia. Gaji dari guru-guru TK – RA negeri dirahasiakan oleh Depdiknas. Gaji dari semua personalia pendidikan seperti prosentase dari pengeluaran negara pada pendidikan di Indonesia 90% (2001) paling tinggi

²³ Note however, that Indonesia's total debt as % of Gross National Product (GNP) is 12.2%, compared with 6.2% for the Republic of Korea, 2.5% for Armenia and 12.1% for Kyrgyzstan.

²⁴ Due to the lack of relevant data and information, no discussion can be provided as to the investment possibilities in other sectors.

didunia. ²⁵Jelasnya, peningkatan perbandingan siswa – guru dapat sebagai cara memaksimalkan keuntungan investasi Depdiknas pada anak usia dini.

Figur 20 : Perbandingan siswa – guru pada pendidikan anak usia dini di negara-negara yang dipilih tahun 2001-2002



Source: Institute of Statistics. (2004). Global Education Digest. Montreal: UNESCO Institute of statistics.

3.3.27 Fasilitas merupakan elemen biaya yang besar, sumber-sumber dana dapat dengan mudah disimpan bila fasilitas sekolah yang ada atau sekolah yang dibentuk oleh yayasan agama kemudian dimanfaatkan untuk menjadi tempat pelayanan anak usia dini. Dalam hal yayasan agama tim review melihat potensi yang besar untuk mengembangkan dan menyampaikan program seperti menyediakan infrastruktur. Walaupun tim review tidak mendapat informasi yang rinci, dapat dimengerti bahwa Direktorat TK dan Sekolah Dasar mencoba menggunakan fasilitas sekolah yang ada untuk menjadi tempat bermacam bentuk Taman Kanak-Kanak. Semua inisiatif ini perlu perluasan lebih dan dukungan lebih lanjut.

3.3.28 Tidak kalah pentingnya kebutuhan yang mendesak untuk diteliti kembali bahwa yang menguntungkan dari pendanaan untuk Taman Kanak-Kanak jumlahnya sampai Rp. 66 milyar lebih daripada setengah anggaran pendidikan anak usia dini Depdiknas tahun 2003. Menurut informasi yang didapat oleh tim review dari pegawai yang terlibat dari Direktorat TK dan Sekolah Dasar, kebanyakan pendanaan ini diarahkan untuk Taman Kanak-Kanak swasta yang dibangun didaerah miskin dikelola oleh kelompok keagamaan.

3.3.29 Sementara data-data yang kuat dan akurat tidak ada tetapi tim review melihat kasus-kasus dimana pelayanan Taman Kanak-Kanak swasta yang mencari keuntungan menyediakan anak-anak dari keluarga yang ekonomi tinggi menerima subsidi untuk guru-guru dari Depdiknas. Depdiknas juga menyediakan pelatihan untuk guru-guru dipelayanan yang prima. Subsidi yang tidak langsung kepada keluarga kaya perlu secara hati-hati dilihat kembali untuk menilai apakah mempunyai dampak dan jumlah kualitas yang berlawanan terhadap beban anggaran pemerintah.

3.3.30 Sementara pemerintah harus memberi fasilitas pendanaan sektor swasta, yang dapat melayani kelompok ekonomi sosial tingkat atas. Ini pada kenyataannya dapat meninggalkan penyediaan pelayanan anak usia dini untuk pemasaran kelompok dan memberi cadangan investasi pemerintah terutama bagi keluarga yang tingkat income nya menengah dan bawah. Tujuan pemerataan adalah bagus diberikan oleh sektor

²⁵ The developed countries' average stands at 76%. Source: EFA Global Monitoring Report. (2004). Paris: UNESCO Publishing.

pemerintah dibantu oleh riset dari negara-negara maju: dengan komponen sektor pemerintah lebih besar dari jumlah investasi anak usia dini juga lebih baik pada kriteria persamaan / keadilan. Juga mempertimbangkan bahwa memberi pelayanan anak-anak miskin adalah salah satu cara terbaik untuk mengoptimalkan keuntungan dari investasi pada anak usia dini, investasi pemerintah diarahkan terutama untuk yang miskin seolah-olah menggandakan pilihan kebijakan untuk membuat pemanfaatan terbaik sumber-sumber dana yang ada .

3.4 Isu yang kritis III : Koordinasi

3.4.1 Permasalahan

Salah satu aspek yang dapat dilihat dari pendidikan anak usia dini secara umum adalah kompleks secara alami. Setiap daerah punya elemen yang berhubungan bukan saja pada sektor pendidikan tetapi juga berhubungan dengan sektor sosial dan kesehatan. Pelayanan anak usia dini dapat disampaikan bukan saja secara formal, tapi juga secara non-formal dan informal. Keterlibatan berbagai sektor dan masyarakat tidak dapat dielakkan dan kebutuhan untuk koordinasi adalah hal yang hakiki.

3.4.2 Koordinasi pada anak usia dini adalah tantangan yang menakutkan secara khusus di Indonesia, dimana Depdiknas itu sendiri punya 2 Direktorat untuk pendidikan anak usia dini karena terpisah dengan pelayanan formal dan non-formal sebanyak 8 kantor departemen dan pemerintah ²⁶ dengan pelayanan pendidikan anak usia dini mereka sendiri-sendiri sama-sama ada.

3.4.3 Salah satu masalah yang paling serius akibat dari banyak yang mengurus adalah klasifikasi artificial dari pelayanan pendidikan anak usia dini. Sering mereka beda satu sama lain tanpa logika yang mendasar pisah dari bantuan administrasi yang berbeda. Ini dihubungkan kepenanganan masalah lain bervariasi dari kebingungan konsep tentang Pendidikan Anak Usia Dini sampai meluas tumpang tindih dan pecah terbagi-baginya manajemen pelayanan, inspeksi, pelatihan dan pengembangan kurikulum dan perencanaan kebijakan untuk anak usia dini yang dipas-paskan dengan pelayanan individu.

3.4.4 Masalah sudah tampak pada pembuatan derap pasal 28 undang-undang no.20 - 2003. Undang-undang membedakan Taman Kanak-Kanak dan Raudathul Athfal serta Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak, sebelumnya sebagai pelayanan formal dan kemudian sebagai pelayanan non-formal tetapi karena undang-undang tidak mengakui pendidikan anak usia dini sebagai bagian sistem pendidikan. Taman Kanak-Kanak dan Raudathul Athfal secara logika bukan pendidikan formal dan mungkin tidak dibedakan dari Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak. Lebih-lebih dalam kenyataan nampak Kelompok Bermain kebanyakan disampaikan kedalam struktur pelayanan yang sama dengan Taman Kanak-Kanak dan Raudathul Athfal; dalam banyak hal ini bukan lagi masalah nama dari kelas yang dimasuki oleh anak usia dini di pelayanan formal. Jadi cara penyampaiannya tidak dapat menjadi dasar untuk memisahkan pengelompokan.

²⁶ The Ministry of National Education, the Ministry of Health, the Ministry of Social Welfare, the Ministry of Women's Affairs, the Ministry of Home Affairs, the Family Welfare and Empowerment Team and the National Family Planning Coordination Board.

3.4.5 Contoh lain adalah cara Direktorat PADU memperlakukan pelayanan formal dan informal. Walaupun namanya sudah jelas pendidikan anak usia dini Direktorat PADU tidak memperhatikan Taman Kanak-Kanak dan Raudathul Athfal, dua pelayanan pendidikan inti untuk anak usia dini yang kepunyaan Direktorat TK dan Sekolah Dasar. Keluarnya BKB dari mandat Direktorat PADU adalah ketidak konsistensi yang lain. Ini dikeluarkan secara mendasar bahwa ini adalah pelayanan formal; tetapi Posyandu yang terpadu, pelayanan informal diprakarsai oleh Direktorat PADU termasuk bagian dari mandat Direktorat. Alasan yang jelas adalah bahwa BKB kepunyaan kantor pemerintah lain-BKKBN.

3.4.6 Dampak: Perbedaan pelayanan yang artificial adalah salah satu hambatan utama dalam menyampaikan pelayanan anak usia dini yang terintegrasi secara murni. Pusat PADU adalah contoh yang khas. Gagasan Direktorat PADU disusun sebagai suatu fasilitas yang terpadu dengan membawa pelayanan yang berbeda bersama pemikiran yang sama. Tetapi walaupun pelayanannya terpadu, Pusat PADU melakukan pelayanan yang bercampur-campur, dan setiap pelayanannya masih dibawah supervisi dan kontrol langsung dari departemen atau petugas pemerintah yang bersangkutan. Dengan komando rantai yang paralel, pelayanan tidak dapat di integrasikan baik perencanaan atau penerapan. Kehadiran pelaku pemerintah yang berbeda juga menimbulkan ketegangan kepada siapa yang bertanggung jawab, permasalahannya belum terpecahkan.

3.4.7 Perbedaan pelayanan yang artifisial juga secara alami mengarah pada proses pemeriksaan yang terputus-putus. Bila fasilitas punya lebih dari satu komponen , ini dikunjungi oleh lebih dari satu sumber pengambil kebijakan. Tumpang tindih semacam itu disayangkan dimana Direktorat PADU saling berhadapan dengan Direktorat TK dan Sekolah Dasar. Misalnya, Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain umumnya disampaikan dalam struktur pelayanan yang sama seperti kelas-kelas junior dan senior berturut-turut. Tetapi Taman Kanak-Kanak di inspeksi oleh Direktorat TK dan Sekolah Dasar, dan Kelompok Bermain di inspeksi oleh Direktorat PADU. Bila pelayanan Taman Kanak-Kanak menggunakan Kurikulum PADU ini masih menerima inspeksi dari Direktorat TK dan Sekolah Dasar. Dua Direktorat dan cabangnya berinteraksi sedikit atau tidak sama sekali baik di pusat maupun ditingkat lokal beresiko kelanjutan pada pengalaman anak usia dini.

3.4.8 Sama juga tidak terkoordinir pelatihan dan pengembangan kurikulum. Universitas Keguruan dan Universitas menawarkan diploma untuk tingkat spesialisasi. Tetapi Direktorat PADU dan Direktorat TK dan Sekolah Dasar menawarkan program pelatihan mereka untuk guru dan pelatih bekerja di pelayanan mereka masing-masing. Pelayanan individu juga menawarkan sesi pelatihan guru berdasarkan inisiatip mereka. Situasi ini sama dengan pengembangan kurikulum. Taman Kanak-Kanak dan Raudathul Athfal menggunakan kurikulum nasional sementara Direktorat PADU baru-baru ini mengembangkan sederetan petunjuk pedagogi untuk pelayanannya bekerjasama dengan Konsorsium PADU. Kurikulum berbasis kompetensi untuk PADU yang terbaru yang mana hubungan dengan kurikulum yang ada lainnya belum diperjelas.

3.4.9 Yang paling penting perencanaan kebijakan pemerintah mengenai anak dini usia telah menderita sebagai akibat dari pelayanan yang berbeda secara artifisial. Departemen yang berbeda, kantor pemerintah dan pelaku merencanakan kebijakan tanpa koordinasi yang jelas. Permasalahan kasus ini adalah perencanaan akses

Pendidikan Untuk Semua. Kelompok Bermain akan meningkatkan jumlah pelayanannya sampai 361% dari 1256 tahun 2002 sampai 4536 tahun 2015; prosentase yang sama meningkat direncanakan untuk Taman Penitipan Anak. Tetapi TK dan RA dibawah Direktorat TK dan Sekolah Dasar, dibentuk untuk meningkatkan hanya., 3.5% dan 9,5% berturut-turut.

3.4.10 Setelah saling berhadapan dengan dekat antara Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak / Raudathul Athfal dan jika Kelompok Bermain diperluas sampai 361% perluasan yang sama pada jumlah TK/RA dibutuhkan untuk menampung tamatan Kelompok Bermain, atau mereka tidak akan mendapat tempat pada tingkat senior.²⁷ Perluasan pelayanan lebih tinggi secara tidak merata untuk kelompok usia anak yang lebih muda bisa merefleksikan dukungan yang ditentukan oleh Depdiknas untuk pendidikan anak dari usia lebih muda tetapi ini juga mengungkapkan perencanaan yang tidak terkoordinasi antara dua Direktorat selama perencanaan kebijakan untuk tahun-tahun awal harus diperhatikan dengan penyediaan langkah-langkah lebih lanjut.

3.4.11 Korban dasar dari administrasi yang terpenggal-penggal adalah kualitas, terutama dalam hal kelanjutan antara pelayanan yang berbeda-beda untuk meyakinkan kemajuan anak secara pelan melalui langkah-langkah yang berbeda dari anak usia dini. Perkembangan anak secara menyeluruh membutuhkan kerjasama diantara sektor yang berbeda. Yang paling penting, perbedaan-perbedaan mengarah kepada pengulangan dan menghabiskan sumber dana. Mengingat pembayaran untuk petugas administrasi porsi besar investasi pemerintah besar pada anak usia dini, sumber-sumber dana yang besar dapat disimpan dengan memotong administrasi dan mengurangi jumlah petugas yang terlibat.

3.4.12 Ukuran yang dibutuhkan : pemerintah telah sadar dari masalah yang berulang-ulang dan administrasi yang terpecah-pecah pada pendidikan anak usia dini dan rasa yang tidak enak, tetapi pendekatannya telah mengarah kepada permasalahan melalui mekanisme koordinasi. Posisi ini perlu ditinjau kembali untuk perubahan struktur. Alasannya adalah sebagai berikut.

3.4.13 Pertama-tama mekanisme koordinasi adalah efektif dalam membawa stakeholders yang berbeda-beda bersama-sama untuk saling tukar informasi dan pengertian tugas jangka pendek yang jelas seperti membuat dokumen dan materi. Tetapi ini memberikan efek yang terbatas kepada pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi yang membutuhkan garis yang jelas dari pengambil kebijakan²⁸

3.4.14 Yang kedua Indonesia tidak lagi memuat dengan berlebih-lebihan mengenai pelayanan anak dini usia yang telah menyebar diseluruh negara dan secara besar-besaran tidak terkoordinir disampaikan oleh pelaku-pelaku individu dilapangan. Ini akan panjang dan cara yang berat untuk mempersingkat pelayanan lapisan bawah dan membuatnya lebih tersedia lebih luas lagi. Pertanyaan pemerintah harus sekarang bertanya bukan saja bagaimana cara menyampaikan tetapi bagaimana cara menyampaikan secara efektif dan efisien. Kebutuhan untuk pengembangan kebijakan

²⁷ In most cases, KB refers to the junior class of TK/RA. But there are cases where KB caters for older children of 5+ and 6+ years. The argument is based on the former case

²⁸ UNESCO. (2003, January). Cross-Sectoral coordination in Early Childhood: Some Lessons to Learn. UNESCO Policy Briefs on Early Childhood, 9. Paris: UNESCO.

yang sesuai dan membangun sistem yang solid tidak optimal lagi untuk negara-negara seperti Indonesia; ini tidak dapat dihindari untuk langkah berikutnya membuat kemajuan pada pelayanan dan pendidikan anak usia dini.

3.4.15 Tidak kalah pentingnya sumber-sumber dana pemerintah untuk anak usia dini di Indonesia benar-benar kurang. Pengeluaran pemerintah pada pendidikan anak usia dini seperti prosentase jumlah pengeluaran pendidikan pada tahun 2000 dan 2001 0.1% jauh dibawah angka 6,9% di Bangladesh dan 2,6% di Kamboja, dimana kedua negara income per kapita GDP lebih rendah dari Indonesia. Dan karena sektor pendidikan prioritas utama masih wajib pendidikan dasar 9 tahun, kesempatan anak usia dini menambah investasi pemerintah dimasa depan sangat kecil. Dalam hal ini mengidentifikasi simpanan dana mungkin paling cara yang paling layak meningkatkan sumber dana. Tetapi penggunaan yang efisien dan distribusi dana itu membutuhkan perencanaan kebijakan yang lebih lancar / singkat.

3.5 Masalah-Masalah Lain

3.5.1 Penyediaan Tenaga Kerja yang Bermutu :

Pemerintah baru-baru ini membutuhkan guru Taman Kanak-Kanak dan Rudathul Athfal untuk punya Diploma (DII). Untuk Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak sertifikat minimum SLTA. Dengan diberikan komponen pendidikan yang disediakan pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak paling tidak kepala sekolah pada pelayanan ini perlu juga tingkat pendidikan yang sama dengan guru Taman Kanak-Kanak dan Raudathul Athfal. Di Brazil dan Mesir guru-gurunya mempunyai pendidikan 4 tahun di Perguruan Tinggi untuk bekerja di Taman Kanak-Kanak. Di Kazakhstan, guru-guru pendidikan anak usia dini dibutuhkan 3 tahun belajar di Perguruan Tinggi. Sedangkan pelatih guru pendidikan anak usia dini dan Kepala Sekolah mendapat pendidikan 5 tahun di Perguruan Tinggi. Standar dinegara maju 3 tahun atau lebih di Perguruan Tinggi.

3.5.2 Kenyataannya bahwa kualifikasi yang sama dibutuhkan di Indonesia untuk pelayanan PAUD seperti guru sekolah dasar didorong seperti yang disebutkan bahwa anak usia dini dianggap sama pentingnya dengan pendidikan dasar. Tetapi apakah ini tujuan realistis dalam hal memenuhi kebutuhan personalia anak usia dini dalam negara menjadi pertanyaan lain.

3.5.3 Pada saat ini hanya 6 % guru-guru anak usia dini mempunyai tingkat kualifikasi ini. Bahkan ditingkat pendidikan dasar hanya 30% guru-gurunya DII. Tetapi menurut Rencana Aksi Nasional PUS, tingkat partisipasi dipelayanan PAUD akan meningkat dari 8% sampai 47% dalam sepuluh tahun mendatang. Ini mungkin tidak realistis untuk mengharapkan pelayanan diperluas sepenuhnya dengan terpenuhi setiap pengajarnya dengan guru-guru yang memenuhi persyaratan.

3.5.4 Satu cara untuk menyeimbangkan keinginan dengan kelayakan akan menyegarkan kembali kader-kader yang dulunya pernah ada pada sistem pendidikan di Indonesia untuk asisten guru mereka yang dibutuhkan dengan mempunyai tingkat pendidikan SLTA dan Diploma dengan spesialisasi anak usia dini. Selama 51% tenaga kerja Taman Kanak-Kanak yang sekarang punya kualifikasi ini, benar-benar layak.

Lebih-lebih ketika dijadikan tim dengan guru-guru yang telah terlatih, asisten guru dapat membantu menyampaikan pelayanan kualitas.

3.5.5 Suatu tantangan yang memberikan ada pada pelatihan tenaga pelayanan perawatan dan pendidikan non-formal. Pelatihan PAUD selama 5 hari sekarang menyediakan tenaga pada pelayanan ini terlalu berani untuk mengatakan efektif. Dengan pelatihan yang terbatas seperti itu, mereka tidak terdorong untuk melihat diri mereka sebagai profesional yang serius. Titik balik yang tinggi digabung dengan insentif yang rendah dan kondisi kerja yang sulit mengurangi kualitas pelayanan untuk kebanyakan PAUD di Indonesia .

3.5.6 Pelatihan untuk tenaga merawat kesehatan tidak dianggap terpisah dari tenaga pada pelayanan PAUD. Mengabadikan pembagian antara perawatan dan pendidikan akan membuat kerugian kedua sistem dan anak itu sendiri. Masalahnya sebaiknya ditujukan melalui sistem pelatihan yang progresif , terintegrasi dan komprehensif baik untuk melatih tenaga. Tujuan ambisius semacam itu bisa tercapai hanya bila pemerintah terlebih dahulu dapat mencapai beberapa tujuan kunci.

3.5.7 Langkah pertama yang harus diefektifkan kategori tenaga. Struktur pelayanan yang sekarang ada 6 kategori : TK, RA, KB, TPA, Posyandu dan BKB. Menyatukan pelayanan-pelayanan ini untuk anak-anak dan untuk orang tua akan mengurangi jumlah kategori tenaga kerja menjadi dua sambil mengubah kesenjangan antara kelompok tenaga pekerja yang berbeda. Dengan mengangkat persyaratan pelatihan secara umum untuk tenaga pekerja dalam pelayanan yang sama seperti kelompok terintegrasi dapat memudahkan interaksi dan kerjasama mereka kemudian.

3.5.8 Kedua, pemerintah dapat memikirkan untuk melihat kembali tingkat kualifikasi yang berbeda yang dibutuhkan dari kategori tenaga yang berbeda dan mengatur kembali sistem kualifikasi yang progresif. Sistem semacam itu mulai dengan pelatihan dasar yang dibutuhkan untuk semua kategori tenaga kerja anak usia dini baik untuk pelayanan pendidikan dan perawatan. Setelah itu tenaga-tenaga dapat mengambil kursus tambahan yang dibutuhkan untuk tugas-tugas dan tanggung jawab yang khusus.

3.5.9 Karena semua elemen pelatihan akan komulatif, personilnya dapat berpindah dari satu kategori ke kategori lain dengan mengambil kursus-kursus tambahan. Perpindahan ini yang semuanya penting karena akan membantu memindahkan kesenjangan status antara kategori-kategori yang berbeda. Kader pelatihan dasar tidak lagi merasa khawatir untuk tetap menjadi status kelas yang lebih rendah dan yang terpisah. Pandangan karir lebih positif ini tentunya akan menggalakkan kerjasama antara tenaga-tenaga yang berbeda dan akibatnya terjadi pelayanan terintegrasi dan perilaku tenaga-tenaga yang lebih baik.

3.5.10 Berkenaan dengan penyampaian pelatihan tantangan utama di Indonesia adalah mempersingkat saluran pelatihan yang berbeda tanpa harus pergi ketempat yang potensial. Prinsipnya harus membuat hampir semua pelaku dan tempat-tempat pelatihan-masyarakat melalui pelayanan individu, LSM, asosiasi profesi, institusi pelatihan swasta, pemerintah, akademi dan universitas. Tetapi untuk menjaga sistem menjadi terpisah-pisah jalur efisien pengambil kebijakan harus mempertegas bahwa pelatihan yang ditawarkan oleh pelaku dan lembaga yang berbeda memenuhi standar dasar, seperti cakupan yang komprehensif dari elemen yang dibutuhkan, jumlah jam minimum, kualifikasi dan pengalaman pelatih yang relevan.

3.5.11 Intervensi oleh pengambil kebijakan tidak perlu formal dari permulaan, tidak perlu mempersulit namun membantu mempermudah kegiatan pelatihan yang ada, ini bisa menjadi permulaan yang baik. Jaringan kerja bisa bermanfaat untuk mengorganisasikan kegiatan dilapangan. Sekali teridentifikasi dan terdaftar, pelaku-pelaku dan lembaga-lembaga dapat dipetakan, yang dapat memudahkan langkah-langkah berikut seperti pendaftaran dan pemberian lisensi/pengesahan. Akreditasi adalah langkah akhir dimana pengambil kebijakan diubah menjadi aktor dan institusi individu. Pada tahap registrasi, penyedia pelatihan dapat diberikan garis-garis besar petunjuk; pada langkah lisensi/pengesahan garis-garis besar petunjuk harus dirinci kedalam standar; ini sebaliknya akan menjadi persyaratan bila penyedia-penyedia pelatihan diakreditasi.

3.5.12 Keterlibatan orang tua :

Masalah mengenai keterlibatan orang tua pada anak berhubungan erat dengan pendidik anak usia dini tetapi cukup penting dan pantas menjadi diskusi yang terpisah. Keterlibatan orang tua penting dan bermanfaat untuk semua yang terlibat – orang tua, anak-anak dan tenaga pendidik. Pertama-tama membantu orang tua mempunyai pengertian yang lebih baik apa yang mereka lakukan untuk memperkuat anak-anaknya dirumah, hubungan antara rumah dan pelayanan meningkatkan masyarakat dari pengalaman perkembangan anak. Orang tua juga dapat menyediakan tenaga kerja tambahan untuk pelayanan.

3.5.13 Tim review melihat bahwa hubungan antara anak usia dini dan keluarga di Indonesia umumnya baik. Walaupun keterlibatan orang tua tidak merupakan persyaratan, orang tua – terutama ibu-ibu – sering berkumpul berpartisipasi dalam kegiatan extra kurikuler atau membantu dalam fungsi perawatan. Mereka juga didesak untuk mendiskusikan kemajuan anak mereka dipusat pelayanan.

3.5.14 Hingga sekarang apapun saluran partisipasi mereka, orang tua diperlakukan lebih sebagai klien dari pada partner/mitra. Akibatnya keterlibatan mereka dalam manajemen pelayanan masih terbatas. Lebih banyak keterlibatan pro aktif orang tua dalam perencanaan dan monitoring program akan membantu untuk meyakinkan bahwa program yang dibuat memenuhi kebutuhan khusus dari anak-anak. Keterlibatan semacam itu juga dapat menggalakkan keterbukaan dan efisiensi yang lebih dalam penggunaan sumber-sumber dana. Orang tua dapat juga didaftarkan untuk memberi nasihat tentang pentingnya pendidikan dan perawatan anak usia dini antara orang tua dengan orang tua yang menyediakan pendidikan dan perawatan anak usia dini secara kecil-kecilan kepada anak-anak mereka. Untuk meyakinkan bahwa keterlibatan orang tua menjadi bagian integral dari manajemen dan pelaksanaan pelayanan anak usia dini, ini dapat dibuat wajib.²⁹

²⁹ The other basic elements of monitoring and evaluation may include the following: safety and health of the physical environment, nutrition, staff training, staff-child ratio and group size, implementation of a holistic and integrated curriculum, monitoring and evaluation of services, parent and community involvement, and availability of teaching and learning resources and equipment.

3.5.15 Perkembangan Data :

Data harus dikumpulkan dengan pemikiran sebagai tujuan khusus, bukan hanya untuk kegiatan katalog. Pada tingkat nasional terutama data harus merespon/menjawab masalah kebijakan khusus yang sedang disampaikan dengan bantuan alat menurut angka. Dibawah disajikan daftar dari masalah-masalah kebijakan pokok dimana tim review menemukan kesenjangan data yang paling serius. Daftar ini dibuat pendek dan realistik.

3.5.16 Pertama, seperti didiskusikan sebelumnya data dan indikator yang dihubungkan dengan akses miskin di Indonesia. Cara penghitungannya yang sekarang tingkat partisipasi seluruhnya dari umur 0+ - 6+ tahun gagal mengungkapkan perluasan partisipasi yang meningkat berdasarkan usia dan bagaimana kemajuan anak-anak melalui tahap-tahap pendidikan anak usia dini yang berbeda-beda. Kecuali data akses tidak dihitung dengan pembagian tahun usia, pembuat keputusan tidak dapat memprioritaskan kelompok usia dan macam pelayanan untuk investasi. Informasi ini mendasar untuk proses perencanaan. Cara terpenting untuk perbaikan pengumpulan data pemerintah adalah pada partisipasi, yang harus dipisah-pisah dengan kelompok berdasarkan usia anak.

3.5.17 Kedua, kesenjangan akses antara daerah pedesaan dan perkotaan dianggap signifikan. Tetapi seperti disebutkan sebelumnya sedikit data yang dapat menjadi bukti-bukti kuat untuk asumsi ini. Pertama data yang tersedia tidak menunjukkan dengan jelas macam-macam pelayanan. Untuk mengungkapkan masalah ini secara tepat pemerintah perlu untuk mengklasifikasi pelayanan dengan saling mengoreksi antara swasta dan negeri, subsidi dan non subsidi, yang mencari keuntungan dan tidak mencari keuntungan diseluruh pedesaan dan perkotaan, untuk mengungkap informasi yang krusial seperti bagaimana investasi pemerintah menguntungkan atau tidak menguntungkan orang miskin. Data yang tidak dihitung secara regional mengenai perluasan dan frekuensi pelayanan menggunakan (pendaftaran dan partisipasi dalam hal jumlah jam, jumlah hari perminggu dan perbulan) dapat juga membantu pemerintah menyampaikan ketidak merataan dalam jenjang partisipasi.

3.5.18 Ketiga data mengenai keuangan benar-benar kurang. Sebagian dilakukan dengan fakta bahwa belum ada investasi utama pada anak usia dini dari pemerintah sementara situasi berkembang terus dari tahun 2002 ketika pemerintah mengalokasikan dana walaupun terbatas anggaran untuk pendidikan dan perawatan anak usia dini³⁰ Tetapi walaupun ini hanya untuk melacak bagaimana sumber dana yang sekarang dipergunakan dan bagaimana efektifnya untuk target orang miskin – alasan utama untuk apa investasi ada – data keuangan lebih rinci dibutuhkan.

3.5.19 Perincian data pengeluaran pemerintah dan pengeluaran swasta mengenai anak usia dini dengan macam dan sumber dana dibutuhkan sementara data mengenai biaya dan bayaran dari orang tua untuk pelayanan yang didukung pemerintah maupun swasta juga bermanfaat. Dengan data ini pembuat keputusan akan melihat darimana dana-dana berasal dan bagaimana itu dihabiskan – yang penting untuk memutuskan kemana dana dipergunakan. Sementara dengan mengetahui proporsi dari anggaran nasional yang dipergunakan untuk anak usia dini akan memungkinkan mengungkap perbandingan dengan negara-negara lain membuka kecilnya investasi Indonesia pada anak usia dini.

³⁰ From 1999 to 2001, there has also been an investment of Rp.477.2 in early childhood, as part of the World Bank's support of the education sector.

3.5.20 Pelatihan guru adalah salah satu dari banyak faktor yang menentukan kualitas pelayanan, tetapi yang penting dapat berbentuk kuantitatif lebih mudah dari yang lain. Sampai sekarang di Indonesia data aspek penting mengenai kualitas kurang. Latar belakang laporan ini menyediakan beberapa data mengenai kualifikasi dan tingkat pelatihan tenaga kerja anak usia dini, tetapi tim review tidak melihat laporan resmi mengenai hal ini. Juga tidak mendapatkan data yang relevan di referensi internasional. Distribusi guru yang bermutu di daerah-daerah (pedesaan dan perkotaan) akan menjadi indikator yang bermanfaat membuktikan ketidak merataan kualitas regional.

3.5.21 Informasi mengenai latar belakang orang tua memberi wawasan kedalam salah satu masalah kebijakan yang lebih penting - siapa yang beruntung dari pelayanan anak usia dini. Data mengenai pendidikan orang tua dan tingkat pendapatan (income), status pekerjaan dibandingkan dengan mereka yang anak-anaknya ada di pelayanan anak usia dini dan mereka yang anak-anaknya tidak ada dalam pelayanan anak usia dini akan sangat bermanfaat. Seperti informasi mengenai anak-anak, dampak terhadap pelayanan anak usia dini dalam kesiapan mereka, performansi, melengkapi, mengulangi dan putus sekolah disekolah dasar sangat penting didalam menentukan investasi pada anak usia dini, sambil mengingat bahwa keuntungan pelayanan anak usia dini melibatkan lebih dari pada performansi sekolah yang meningkat.

3.5.22 Ada juga kebutuhan untuk meningkatkan pelaporan dan dokumentasi data. Satu masalah adanya pelayanan yang tidak terdaftar. Insentif pelaporan (misalnya kredit pajak, pelatihan bebas, subsidi dll) dapat membantu memberantas masalah ini. Pelaporan yang benar masih jauh, data yang tidak didokumentasikan sangat sedikit manfaatnya. Contoh yang baik dari ini adalah bagian dari Rencana Aksi Nasional PUS menjadi petunjuk besar dari biaya-biaya yang diantisipasi dari pelayanan yang berbeda-beda. Laporan ini tidak mencantumkan sumber data, metodologi pengumpulan data, atau metode yang digunakan untuk mengukur indikator dan batasan-batasannya. Ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kelayakan data dan hasilnya.

3.5.23 Beberapa perkembangan data membutuhkan riset sebelumnya untuk mengidentifikasi variabel yang perlu dimonitor dan dievaluasi. Walaupun data itu tidak mengarah pada perkembangan data, beberapa temuan riset dapat bermanfaat untuk riset itu sendiri sebagai alat advokasi / penasehatan untuk anak usia dini. Tiga contoh data seperti itu dan informasi bahwa pemerintah akan menemukan yang paling bermanfaat : analisa cost-benefit dari pelayanan yang berbeda, untuk mengevaluasi kembalinya modal pada setiap layanan; studi dari dampak partisipasi pada anak usia dini mengenai performansi sekolah anak usia dini, dapat disuguhkan sebagai disebutkan sebelumnya, sebagai instrumen advokasi yang kuat untuk pendidikan anak usia dini, sebagai strategi untuk mendukung pendidikan sekolah : dan akhirnya informasi mengenai aspek kualitas pelayanan sangat kritis bagi perkembangan anak dan dapat menentukan biaya secara efektif.

3.5.24 Untuk menghubungkan riset dengan perencanaan kebijakan dan sebaliknya, tidak perlu untuk mengatakan bahwa hubungan dekat antara riset masyarakat dan pemerintah esensial. Satu cara yang bermanfaat untuk menguatkan hubungan ini adalah untuk membuat data pemerintah siap bekerjasama dengan universitas dan riset masyarakat. Ini akan menimbulkan ide riset dan kegiatan riset selanjutnya yang langsung berhubungan kepada masalah kebijakan. Hubungan seperti itu kemudian

dapat dikuatkan melalui mekanisme koordinasi sekarang seperti Konsorsium PADU dimana riset masyarakat ditampilkan.

3.5.25 Perencanaan kebijakan :

Perbaikan teknis juga dibutuhkan dalam perencanaan tujuan PUS mengenai anak usia dini. Rencana Aksi Nasional PUS Indonesia mengenai anak usia dini secara keseluruhan berupa garis-garis besar dan umum. Ini hanya mencantumkan prinsip-prinsip utama perkembangan anak dan menentukan tujuan-tujuan menurut angka-angka untuk perluasan pelayanan pendidikan dan perawatan, memberi perkiraan-perkiraan kebutuhan keuangan. Tetapi validitas dan ketelitian dari proyeksi keuangan adalah meragukan. Derap dokumen menjadi kesempatan yang baik untuk kuantitas / penjumlahan, salah satu faktor, jumlah anak-anak dan keluarga mengambil keuntungan dari pelayanan anak usia dini dan menunjukkan secara jelas jumlah anak-anak yang potensial yang kemudian dapat keuntungan dari sejumlah perbaikan yang nyata dari strategi kebijakan, termasuk keputusan investasi.

3.5.26 Lebih-lebih agar supaya rencana menjadi instrumen nyata untuk suatu gerakan, tujuan jangka panjang harus diterjemahkan kedalam rencana jangka pendek, yang harus diuji kelayakannya agar realistik. Yang paling penting adalah prioritas. Dalam pandangan sumber-sumber yang ada terbatas untuk anak usia dini. Pemerintah kelihatannya tidak mampu untuk mengejar semua tujuan yang direncanakan dengan perhatian yang sama. Pendekatan bertahap dibutuhkan, memprioritaskan dan mengoptimalkan untuk membangun pada struktur dan kegiatan yang ada. Prioritas mungkin diungkapkan dalam istilah kelompok usia dan bentuk pelayanan yang akan menerima perhatian dan investasi kebijakan.

3.5.27 Mengenai masalah kebijakan Rencana Aksi Nasional PUS harus mengangkat perbedaan yang ada secara lebih eksplisit dalam akses dan kualitas pada anak usia dini diantara anak-anak dari daerah dan latar belakang keluarga lain. Tujuan – baik akses maupun kualitas – harus ditentukan perbedaan-perbedaan dengan tingkat yang berbeda untuk daerah pedesaan dan perkotaan. Hal yang sama dapat dikatakan mengenai aspek khusus dari kualitas. Tanpa penentuan tujuan daerah yang spesifik diidentifikasi pada tingkat nasional, ini akan sukar untuk memotivasi pengambil kebijakan lokal untuk mengembangkan rencana operasional untuk menerapkan tujuan global.

3.5.28 Benar, karena kebijakan desentralisasi di Indonesia, tujuan nasional dirinci pada tingkat lokal. Tetapi tim review melihat sinyal kecil dari perencanaan sistematis pada tingkat lokal. Perencanaan sub-nasional bukan semata-mata latihan teknis – birokrasi. Ini harus didasari dengan penilaian yang jelas dari kebutuhan lokal dan mencari untuk melibatkan dan mengkoordinasikan semua pelaku dan stakeholders. Forum PADU dapat menjadi kekuatan memanggil rapat tentang masalah ini, atau paling tidak tukar informasi diantara stakeholders.

4. REKOMENDASI

4.1 Mengoptimalkan

Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan di tahun-tahun terakhir ini. Diantaranya keputusan Direktorat untuk mengefektifkan pelayanan lapisan bawah dan menyatukan pelayanan untuk ibu-ibu dengan pelayanan anak usia dini wajar menerima penghargaan khusus. Ini telah memungkinkan banyak anak usia dini di Indonesia mendapat akses pelayanan pendidikan dan perawatan dasar untuk memastikan perkembangan kesehatan mereka. Walaupun ini belum membantu banyak meningkatkan statistik partisipasi yang memfokuskan pada pelayanan formal, ini suatu kemajuan yang sangat penting. Posyandu, BKB, dan banyak variasi lainnya dari pelayanan-pelayanan ini (misalnya Taman Posyandu) perlu mendapat dukungan yang terus menerus. Penyatuan pelayanan – pelayanan kesehatan dengan pelayanan pendidikan, pelayanan untuk ibu-ibu dengan pelayanan anak usia dini – harus berlangsung terus menerus menjadi strategi pemerintah memperluas akses merata kepada pelayanan-pelayanan kualitas dasar, terutama antara anak usia dini. Kenyataannya pendekatan yang dibutuhkan masih banyak, dengan mempertimbangkan tingkat kekurangan gizi yang relatif tinggi di negara ini dari anak usia dini dan tingkat kematian ibu yang tinggi.³¹

4.2 Dengan mempertimbangkan perbandingan tingkat aksara dan pendidikan yang tinggi dari ibu-ibu muda di Indonesia, ³²strategi untuk mendidik dan merawat anak-usia dini melalui orang tua adalah layak dan biayanya efektif. Tetapi bagaimanapun perlu dipikirkan fakta bahwa penduduk perkotaan di Indonesia meningkat dengan cepat, ³³dan kebutuhan untuk pelayanan anak usia dini diantara orang tua pekerja terutama ibu-ibu yang bekerja didaerah perkotaan juga meningkat. Apa kemudian yang dibutuhkan, disamping memperkuat pendidikan orang tua adalah pelayanan yang disediakan untuk kebutuhan penitipan anak untuk orang-orang tua yang bekerja, terutama orang-orang tua didaerah perkotaan.

4.3 Konsorsium PADU harus diperkuat dan digerakan sebagai mitra penting dari pemerintah dalam menerangkan keputusannya dilapangan. Sementara pemerintah disarankan untuk mengevaluasi fungsi Forum PADU sebagai lembaga untuk membentuk kebijakan terpadu untuk anak usia dini. Seperti diterangkan sebelumnya, apa yang dibutuhkan lebih dari pada mekanisme koordinasi dalam mengembangkan kebijakan terpadu adalah garis yang jelas dari pengambil kebijakan dan leadership, yang dapat menghimpun partnership paling efektif antar mitra dan stakeholders yang berbeda.

4.4 Investasi Pemerintah

Penyediaan lebih banyak pelayanan yang berorientasi pendidikan terutama untuk anak usia dini diatas 3+ tahun memerlukan pelayanan terstruktur lebih banyak dari pada Posyandu atau BKB; dan meyakinkan akses untuk pelayanan semacam itu mementingkan mengundang peningkatan investasi pemerintah. Kebutuhan yang paling mendesak adalah peningkatan keseluruhan pada investasi pemerintah sebagai jaringan tambahan untuk sumber-sumber pendanaan pendidikan bukan re-alokasi anggaran

³¹ See Tables 6 and 14 in Annex 3.

³² See Tables 5 and 9 in Annex 3.

³³ See Tables 1 in Annex 3.

pendidikan. Investasi tambahan harus dilihat sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk membuat Rencana Aksi Nasional PUS menjadi kenyataan dalam menentukan target realistis yang dapat dicapai secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Misalnya tingkat pengulangan pada kelas 1 Sekolah Dasar di Indonesia lebih tinggi dari pada kelas-kelas berikutnya.³⁴ Investasi pada pendidikan anak usia dini dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk mengatasi masalah ini.

4.5 Visi memberi inspirasi pada aksi. Ada hubungan yang hilang pada visi Indonesia mengenai anak usia dini yaitu perannya dalam strategi perkembangan nasional. Salahsatu prioritas kebijakan yang paling tinggi untuk Depdiknas akan membawa pendidikan yang tidak bersaing, keuntungan ekonomi dan sosial dari anak usia dini dibuktikan oleh kelebihan studi, terhadap perhatian pada pemerintah (bukan swasta) secara umum dan pembuat kebijakan secara khusus. Termasuk PAUD sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah cara yang bermanfaat dari sumber-sumber dana yang hemat.

4.6 Pendidikan Anak Usia Dini yang bebas bayar untuk keluarga miskin

Pendanaan pemerintah yang meningkat harus diprioritaskan dan sangat penting untuk disalurkan untuk anak-anak miskin dengan akses minimum ke pelayanan pendidikan anak usia dini, dimana jenjang pemerataan paling besar yang sekarang ditemui. Kursus-kursus pendek untuk pendidikan anak usia dini yang bebas bayar akan menjadi pilihan. Itu dapat disampaikan kebangunan sekolah, di masjid atau fasilitas masyarakat yang lain. Bantuan pemerintah bisa masuk dalam bentuk menyiapkan guru-guru yang dilatih dan dibiayai pemerintah per pelayanan.

4.7 Pendidikan anak usia dini dibuat umum adalah dorongan hati yang sering dilakukan. Pendidikan Anak Usia Dini yang bebas bayar untuk semua tentunya mempunyai kekurangan potensi. Pertama bila ini diterapkan dalam situasi dimana kesenjangan pemerataan besar, seperti masalahnya di Indonesia, kebijakan harus ditekankan agar berpihak kepada yang miskin, dengan menekankan akses anak-anak miskin sebelum pemberian-pemberian nama diperluas kepada semua anak-anak termasuk anak yang kaya. Dalam masalah Indonesia, ini menyatakan secara tak langsung bahwa pemberian label harus pertama-tama diperluas keanak-anak dipedesaan diprovinsi yang miskin. Kalau tidak anak-anak kaya yang mempunyai akses lebih mudah kepada struktur pelayanan jauh lebih beruntung dari kebijaksanaan dari pada yang miskin.

4.8 Bahkan untuk anak-anak yang miskin kebijakan harus diperkenalkan dengan kehati-hatian dan lebih baik setelah tingkat partisipasi anak usia dini mencapai tingkat tertentu. Ketika pendidikan anak usia dini bebas, orang tua terutama didaerah yang miskin cenderung untuk menyembunyikan partisipasi anak mereka pada pelayanan anak usia dini sampai mereka mencapai usia yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus yang ekstrim, ini dapat menyebabkan bangkrutnya pelayanan anak usia dini. Pengenalan pendidikan anak usia dini yang bebas bayar mungkin mengakibatkan alasan yang memaksakan untuk memperkuat pelayanan semacam itu seperti Posyandu dan BKB, atau pelayanan yang memadukan keduanya, untuk anakusia dini.

³⁴ See Tables 11 in Annex 3.

4.9 Menyatukan dua Direktorat di Depdiknas

Pendidikan dan perawatan anak usia dini adalah pondasi untuk belajar sepanjang hayat. Tetapi pondasi belajar sepanjang hayat di Indonesia terputus-putus dikarenakan bantuan administrasi yang berlainan. Langkah yang paling pertama harus menyatukan dua Direktorat di Depdiknas yang terlibat dengan anak usia dini – Direktorat TK dan Sekolah Dasar dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

4.10 Ini pra-syarat untuk membuat rasionalisasi pelayanan anak usia dini yang memerlukan pelatihan, monitoring, evaluasi dan sistem administrasi. Sekali dua Direktorat dan pelayanan-pelayanan mereka terkoordinasi untuk mengembangkan struktur pelayanan yang menyatu, pemerintah akan mampu melihat lebih jelas apa kebutuhan perkembangan khusus anak usia dini dari kelompok usia yang berbeda-beda, bagaimana kebutuhan anak usia dini dapat disediakan untuk bermacam pelayanan yang berbeda, dan bagaimana pelayanan yang berbeda ini dapat dikoordinasikan untuk menghindari perbedaan-perbedaan, tumpang tindih dan penghabisan sumber dana. Pendeknya ini akan mampu melihat secara lebih komprehensif bagaimana alur pembelajaran tidak terpotong dari lahir sampai disediakan pelayanan yang berbeda tapi berhubungan, secara terus menerus tanpa tumpang tindih. Dengan profil demografi yang distabilkan³⁵, inilah waktunya pemerintah untuk memberi lebih banyak perhatian kepada perkembangan anak usia dini secara sistematis, terutama untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang disiapkan dan meletakkan pondasi untuk belajar sepanjang hayat mulai dari kelahiran.

4.11 Penyatuan dua Direktorat ini juga akan membantu mengembangkan dan menyampaikan pelayanan yang terbagi secara murni. Lebih penting lagi penyatuan administrasi dalam Depdiknas akan memberi Departemen ini posisi yang lebih utama. Sebagai pelaku pemimpin pada anak usia dini termasuk sektor lainnya yang pada akhirnya membantu memudahkan perencanaan terpadu dari kebijakan anak usia dini antar sektor yang berbeda dari pemerintahan. Pekerjaan kemitraan akan bagus bila ada kepemimpinan; dan perpaduan administrasi dengan Depdiknas akan membantu pemerintah mengumpulkan pusat kepemimpinan yang paling dibutuhkan anak usia dini.

4.12 Desentralisasi :

Didalam melaksanakan semua perubahan-perubahan ini, harus dicatat bahwa dengan desentralisasi, pertanggung jawaban untuk penyediaan bersandar kepada pemerintah lokal. Dengan demikian perubahan yang terstruktur pada tingkat pusat penting dicerminkan pada tingkat lokal. Kapasitas pelaksanaan program harus diperkuat pada tingkat lokal. Kebijakan nasional harus dibentuk pada tingkat garis-garis besar, tetapi spesifikasinya ditentukan oleh stakeholders lokal, lebih penting lagi harus ada mekanisme yang meyakinkan dan monitor pelaksanaan kebijakan nasional yang dilakukan oleh stakeholders lokal. Terutama dibutuhkan adalah mekanisme dan komitmen mereka untuk menggerakkan sumber-sumber dana. Bila investasi pada anak usia dini diberikan secara optimal pengambil kebijakan lokal kemungkinan tidak mengikuti keseluruhan tanggung jawab itu.

4.13 Perundang-undangan :

Di Indonesia ada banyak kebijakan dan rencana untuk anak usia dini dikembangkan secara individu oleh sektor-sektor pemerintah yang berbeda. Beberapa orang

³⁵ See Tables 1 in Annex 3.

memperdebatkan kebutuhan dari kebijakan terpadu; dan banyak negara dengan keadaan yang sama akan berlomba-lomba memperbaiki situasi dengan mengembangkan kebijakan terpadu menjadi kesatuan yang dapat disetujui untuk semua sektor yang terlibat. Tetapi apa yang sering terjadi adalah kebijakan diatas kertas tanpa dukungan keputusan. Ketika administrasi berbeda menjadi masalah misalnya apa yang lebih dibutuhkan dari pada kebijakan yang tambal sulam adalah keputusan untuk mengefektifkan administrasi yang sepatutnya diundangkan. Dengan demikian agar pelaksanaan perubahan-perubahan yang direkomendasi diatas, pemerintah harus memperhatikan dan mempersiapkan perundang-undangan yang penting. Pembentukan kebijakan harus berisi keputusan penting untuk dibuat yang bisa diartikan kedalam ukuran perundang-undangan bukan uraian prinsip-prinsip yang panjang. Perubahan-perubahan yang nyata dapat disampaikan hanya dalam tindakan yang relevan bukan dalam refleksi yang panjang.

REFERENSI

Cleveland, G., & Krashinsky, M. (1998). The benefits and costs of good childcare: The economic rationale for public investment in young children. Toronto: University of Toronto.

EFA global monitoring report. (2003). Paris: UNESCO Publishing

EFA global monitoring report. (2004). Paris: UNESCO Publishing

Hart, B., & Risley, T (1995). Meaningful differences in everyday experiences of young American children.

Baltimore: Brookes.

Lynch, R. (2004). Expeditional returns: Economic, fiscal, and social benefits of investment in early childhood development. Washington: Economic Policy Institute

National plan of action: Indonesia's education for all (2003). Jakarta: Proyek Pendidikan Luar Sekolah

Schweinhart, L., & Montie, J. (2004, November 17). High/scope perry preschool study through age 40.

Presentation at the World Bank

Susenas. (2003)

UNESCO. (2003, January). Cross-sectoral coordination in early childhood: some lessons to learn.

UNESCO Policy Briefs on Early Childhood, 9. Paris: UNESCO

UNESCO. (2003). National case study on the early childhood care and education in Indonesia. Jakarta:

UNESCO office in Jakarta

UNESCO. (2004). Background report of Indonesia. Paris: UNESCO

UNESCO Institute of Statistics. (2004) Global education digest. Montreal: UNESCO Institute of Statistics.

United Nations. (2001). Common country assessment for Indonesia. Jakarta: United Nations.

World Bank report, 23028-IND. (2001). The World Bank.

World development indicators. (2004). The World Bank.

LAMPIRAN 1:

Jadwal dari Kunjungan Tim Review

Tanggal	Waktu	Program
24 Agustus 2004		Tiba di Jakarta
	17.00	Pertemuan dengan: Mr. Frank Hijmans, Spesialis Desentralisasi dan Manajemen Pendidikan, Depdiknas
	19.00	Pertemuan dengan Bpk. Fasli Jalal, Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Depdiknas Mira Fajar, Project Officer Nasional, Kantor UNESCO, Jakarta
25 Agustus 2004	08.00	Mengunjungi TK/Kelompok Bermain Istiqlal Jakarta Pusat :
	13.00	TK Khatolik, TK Muslim (RA), Kelompok Bermain
26 Agustus 2004	08.00	Pertemuan dengan :
	09.30	Pejabat provinsi di Yogyakarta
	09.30 15.00	Mengunjungi 2 : (Tim 1 ke Kab. Sleman, Tim 2 Kab. Kulon Progo) TK, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, LSM.
27 Agustus 2004	06.30	Mengunjungi 3 (Banten – Tangerang)
	13.00	Pusat PADU
	14.00	Pertemuan dengan :
	15.00	Mr Stephen Hill, Direktur Kantor UNESCO, Jakarta
	15.00 18.00	Pertemuan dengan : Para Ahli Nasional yang menyiapkan latar belakang laporan Forum Pendidikan Anak Dini Usia
30 Agustus 2004	Pagi	Pertemuan dengan : Pejabat Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar)
	Pagi Siang	- Pertemuan 4 (Sulawesi Selatan) : Pusat PADU, Kelompok Bermain, Pusat Pelatihan Guru
	Siang	Pertemuan dengan : Forum Pendidikan Anak Dini Usia, Provinsi Sulawesi Selatan
31 Agustus 2004	Pagi	Pertemuan 4 Lanjutan (Sulawesi Selatan) : KB, TK, SD Kelas 1, Pusat Pendidikan Non-formal
1 September 2004	Pagi	Pertemuan dengan : Stakeholders Pusat (Akademis, Profesional, Asosiasi LSM, Pelatih, Penyedia pelayanan seperti Guru, Kelompok Orang Tua Dll)
	Siang	Pertemuan Individu
2 September 2004	Pagi	Pertemuan dengan : POKJA (Perwakilan dari Departemen terkait)
	Siang	Presentasi Akhir.

Daftar Pusat-pusat Pelayanan yang dikunjungi

Tanggal Kunjungan	Propinsi	Nama Pusat-Pusat Pelayanan		Macam Pelayanan
25 Agustus	Jakarta	Shanta Ursula		TK Katholik
		Keuangan sekolah		Kelompok Bermain dan TK Muslim
26 Agustus	Yogyakarta	Tim 1 (Kab. Sleman)	Harapan Bangsa	Kelompok Bermain
			An Mur	Taman Penitipan Anak
			Pusat Sumber ECCD	Pusat LSM
		Tim 2 (Kab. Kulon Progo)	Shanta Theresia	Taman Penitipan Anak dan TK
Permadi Siwi	Kelompok Bermain			
27 Agustus	Banten	Pusat PADU (Kec. Rajeg)		Pusat PADU (Posyandu+ Program Ibu+ Kelompok Bermain+TK)
30 Agustus	Sulawesi Selatan	Pusat PADU (Kab. Maros)		Pusat PADU (Posyandu+Program Ibu+KelompokBermain +TK)
		Madina Tunajah (Kab. Baru)		Kelompok Bermain dan Pusat Pelatihan Guru
31 Agustus	Sulawesi Selatan	Pertiwi (Kab. Makassar)		Kelompok Bermain dan TK dan SD
		Banukang (Kota Makassar)		Kelompok Bermain dan Pendidikan Non-formal (menyatu dengan Masjid)
		Pembina (Kota Makassar)		Model TK Pemerintah

LAMPIRAN 2: Tim Review

Mr. Gabriel Carron
Consultant
9B, Rue Stendhal
75020 Paris
France
gacarron@aol.com

Ms. Khoo Kim Choo
Consultant
11 Marigold Drive
576412
Singapore
khookc@starhub.net.sg

Mr. Raynald Lortie
WEI Statistical Program Specialist
UNESCO Institute for Statistics
P.O Box 6128, Succursale Centre-Ville
Montreal, Canada
r.Lortie@uis.unesco.org

Mr. Abrar Hasan
Head, Education and Training Division
Directorate for Education
OECD
2, rue Andre-Pascal
75775 Paris Cedex 16
France
Abrar.hasan@oecd.org

Ms. Soo-Hyang Choi
Chief, Section for Early Childhood and Inclusive Education
Division of Basic Education, Education Sector
UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France
sh.choi@unesco.org

Assistant:
Ms. Hye-Jin Park
Associate Expert, Section for Early Childhood and Inclusive Education
Division of Basic Education, Education Sector
UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France
Hj.park@unesco.org

LAMPIRAN 3 : Data Perbandingan Tentang Indonesia

1. Kependudukan

Tabel 1 : Ukuran, Pertumbuhan, Distribusi dan Komposisi Penduduk

	Jumlah Penduduk, 2002 (Juta)	Rata-rata Tingkat pertumbuhan pertahun (%)		Tingkat Kesuburan (kelahiran/wanita)		Penduduk Perkotaan (total %)		Penduduk Pedesaan		Pertumbuhan Usia 0 – 14 tahun 2002 (%)
		1980-2002	2002-2015	1980	2002	2002	2015	Total %	Rata-Rata Pertumbuhan Pertahun %	
								2002	1980-2002	
Indonesia	212	1.6	1.1	4.3	2.3	44.5	57.8	57	0.2	29.8
Proyek³⁶										
Brazil	174	1.6	1.1	3.9	2.1	82.4	88.4	18	-1.2	27.9
Kazakhstan	15	0.0	0.3	2.9	1.8	55.8	58.2	44	-1.2	25.3
Kenya	31	2.9	1.4	7.8	4.2	38.2	51.8	65	1.7	42.6
Referensi³⁷										
China	1,280	1.2	0.6	2.5	1.9	37.7	49.5	62	0.1	24.2
India	1,049	1.9	1.2	5.0	2.9	28.1	32.2	72	1.6	32.8
Malaysia	24	2.6	1.5	4.2	2.8	63.3	71.0	41	1.0	33.3
Philipina	80	2.3	1.6	4.8	3.2	60.2	69.2	40	0.3	36.5
Rep. Korea	48	1.0	0.4	2.6	1.5	80.1	83.0	17	-3,2	21.0
Singapura	4	2.5	1.1	1.7	1.4	100	100	0	-	21.2
Thailand	62	1.3	0.6	3.5	1.8	31.6	36.7	80	1.1	23.2
Global³⁸										
Income Rendah	2,495	2.1	1.5	5.5	3.5	31.2	37.5	69	1.6	36.5
Income Menengah rendah	2,408	1.3	0.8	3.1	2.1	52.8	61.0	51	0.2	26.1
Income Atas Menengah	329	1.5	1.1	3.6	2.4			25	0.1	28.9
Income Tinggi	966	0.7	0.3	1.9	1.7	77.8	80.9	22	-0.3	18.3
Dunia	6,199	1.5	1.0	3.7	2.6	47.8	53.5	52	0.8	29.2

Reference: World Development Indicators. (2004). The World Bank. / Human Development Indicators. (2004). UNDP.

Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk padat di dunia melebihi 200 juta orang . Pertumbuhan penduduknya telah menurun. Tingkat pertumbuhan penduduknya diproyeksikan untuk tahun 2002 – 2015, 1,1% lebih rendah dari pada negara-negara yang incomenya rendah yang rata-rata 1,5%. Tingkat kesuburan telah menurun tajam dari 47% dari 4,3 pada tahun 1980 menjadi 2,3 pada tahun 2002, penurunan prosentase menjadi lebih tinggi dari pada negara-negara dalam referensi dari daerah kecuali

³⁶ Countries participating in the UNESCO/OECD Early DChildhood Policy Review Project.

³⁷ Countries selected from the region to provide Indonesia with a frame of reference or benchmarking.

³⁸ According to the World Development Indicators, low-income countries are those with a GNI per capita of \$735 or less in 2002; lower-middle-income countries of between \$735 and \$2,935; upper-middle-income countries of between \$2,935 and \$9,076; and high-income countries of \$9,076 or more. According to this categorization, Indonesia, Whose GNI per capita in 2002 is \$710, is one of the low-income countries.

Thailand. Penduduk umur 0 – 14 tahun , kira-kira 30%. Lebih rendah dari pada rata-rata negara-negara yang income rendah, 37%. Profil demografinya tidak melebar pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Sementara penduduk perkotaan di Indonesia berkembang dengan cepat. Ini diproyeksikan tumbuh sampai 30% dari 44.5% pada tahun 2002 sampai 57,8% tahun 2015. Setelah Cina inilah tingkat pertumbuhan yang paling cepat dibandingkan dengan negara-negara dalam referensi. Naiknya penduduk perkotaan diasosiasikan dekat dengan naiknya income rumah tangga yang berlipat dua dengan kurangnya akses terhadap perawatan anak dari anggota keluarga. Jadi di Indonesia mungkin beberapa anak membutuhkan pelayanan anak usia dini, kebutuhan untuk pelayanan anak usia dini antara orang tua pekerja di daerah perkotaan akan meningkat secara cepat, sebanyak negara-negara yang berpenghasilan menengah. Pelayanan perawatan anak untuk orang tua pekerja dipertkotaan dengan cepat akan dapat menjadi masalah kebijakan di Indonesia.

2. Ekonomi

Tabel 2 : Ukuran dan struktur ekonomi

	Income per kapita nasional kotor PPP (\$), 2002	Pengangguran, jumlah angkatan kerja % 2000 - 2002	Pertumbuhan GDP %, 2001 - 2002	Struktur GDP, 2002		
				GDP Pertanian %	GDP Industri %	GDP Pelayanan %
Indonesia	3,070	6.1	3.7	17	44	38
Proyek Brazil	7,450	9.4	1.5	6	21	74
Kazakhstan	5,630	-	9.8	9	39	53
Kenya	1.010	-	1.0	16	19	65
Referensi China	4,520	3.1	8.0	15	51	34
India	2,650	-	4.6	23	16	51
Malaysia	8,500	3.9	4.1	9	47	44
Philipina	4.450	9.8	4.4	15	33	53
Rep. Korea	23,730	15.8	6.3	4	41	55
Singapura	16,960	1.8	5.4	9	43	48
Thailand	6,890	1.8	5.4	9	43	48
Global Income Rendah	2,110	-	4.0	24	30	46
Income menengah Randa	5,290	4.3	4.9	10	34	56
Income menengah Atas	9,550	9.0	-1.2	6	34	60
Income Tinggi	28,480	6.2	1.6	2	27	71
Dunia	7,820	-	1.9	4	29	68

References: World Development Indicators. (2004). The World Bank

Dalam hal income per kapita nasional kotor PPP, Indonesia (\$3,070) turun diantara negara-negara income rendah (\$2,110) dan income menengah bawah (\$5,290). Pengangguran tahun 2000-2002, 6,1% dekat dengan rata-rata negara-negara yang berincome tinggi. GDPnya tumbuh 3,7% pada tahun 2001 sampai 2002. Walaupun

lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan global 1.9%, ini tingkat pertumbuhannya relatif rendah di wilayah, yang tingkatnya 2,2% di Singapura sampai 8% di China. Dalam hal struktur GDP Indonesia mirip dengan China dan Malaysia: Industri menjadi distributor paling besar (44%) terhadap GDP, sedangkan dinegara-negara lain sektor pelayanan cenderung paling besar.

Tabel 3: Distribusi Income dan Kemiskinan

	Andil income atau konsumsi %		Indeks GINI ³⁹ (Tahun survey)	Garis kemiskinan Internasional				
	Paling rendah 10%	Paling tinggi 10%		Tahun Survey	Penduduk dibawah \$1 per hari, %	Jenjang Kemiskinan \$1 per hari, %	Penduduk dibawah \$2 per hari, %	Jenjang Kemiskinan \$2 per hari, %
Indonesia	3.6	28.5	34.3 (2002)	2002	7.5	0.9	52.4	15.7
Proyek Brazil	0.5	46.7	59.1 (1998)	2001	8.2	2.1	22.4	8.8
Kazakhstan	3.4	24.2	31.3 (2001)	2001	<2	<0.5	8.5	1.4
Kenya	2.3	36.1	44.5 (1997)	1997	23	6.0	58.6	24.1
Referensi China	1.8	33.1	44.7 (2001)	2001	16.6	3.9	46.7	18.4
India	3.9	27.4	32.5 (99-00)	99-00	34.7	8.2	79.9	35.3
Malaysia	1.7	38.4	49.2 (1997)	1997	<2	<0.5	9.3	2.0
Philipina	2.2	36.3	46.1 (2000)	2000	14.6	2.7	46.4	17.2
Rep. Korea	2.9	22.5	31.6 (1998)	1998	<2	<0.5	<2	<0.5
Singapura	1.9	32.8	42.5 (1998)	-	-	-	-	-
Thailand	2.5	33.8	43.2 (2000)	2000	<2	<0.5	32.5	9.0

Reference: World Development Indicators. (2004). The World Bank.

Dibandingkan dengan Brazil yang indeks GINI nya mencapai hampir 60 pada tahun 1998, Indonesia bukannya negara dengan perbedaan tantangan khusus dalam distribusi income dan konsumsi. Indeks GINI-nya pada tahun 2002 adalah 34,3 % , lebih rendah dari negara-negara pada referensi, dengan pengecualian India dan Rep. Korea. Andil 10% terkaya atau konsumsi kira-kira 29% income nasional, sementara di Malaysia dan Philipina angkanya berturut-turut sekitar 38% dan 36%. 10% terbawah andil atau konsumsi Indonesia sekitar 4% income nasional, sementara Singapura, China dan Malaysia angkanya dibawah 2%.

Ketika garis kemiskinan internasional dibawah \$1 per hari diperlakukan, sekitar 8% penduduk Indonesia turun dibawah garis kemiskinan. Tetapi ketika garis-garis kemiskinan dibawah \$2 per hari diterapkan, lebih dari setengah penduduknya memperhatikan, sementara antara negara-negara pada referensi, India mempunyai angka penduduk lebih besar yang terkenal (sekitar 80%). Sampai sekarang dibandingkan dengan China atau Philipina yang prosentase penduduknya dibawah garis kemiskinan \$2 per hari lebih kecil dari Indonesia, Indonesia menunjukkan jenjang kemiskinan pada \$2 per hari (15,7%), lebih rendah dari 18,4% di China atau 17,2% di

³⁹ “Measures the extent to which the distribution of income among individuals or households within an economy deviates from a perfectly equal distribution.” Source: World Development Indicators. (2004). The World Bank. P.63

Philipina. Kedalaman kemiskinan di Indonesia tidak sedalam dua negara, yang bagiannya telah diterangkan dengan relatifnya indeks GINI lebih rendah.

3. Perkembangan Perempuan

Tabel 4 : Status pekerjaan perempuan

	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan, %, umur 15-64		Pekerjaan perempuan dengan kegiatan ekonomi (%) (2000-2002)			Perempuan dalam sektor non-pertanian, total %, 2000-2002
	1980	2002	Pertanian	Industri	Pelayanan	
Indonesia	45.6	59.1	54 (1980) 42 (95-01)	13 (1980) 16 (95-001)	33 (1980) 42 (95-01)	29.7
Proyek						
Brazil	35.7	47.0	16	10	74	45.7
Kazakhstan	70.5	68.9	-	-	-	-
Kenya	77.7	76.8	16	10	75	37.8
Referensi						
China	75.5	79.5	-	-	-	39.2
India	47.8	45.0	-	-	-	17.1
Malaysia	42.8	51.3	14	29	57	36.5
Philipina	46.0	51.8	25	12	63	42.2
Rep. Korea	50.2	59.1	12	19	70	41.5
Singapura	47.4	54.7	0	18	81	46.9
Thailand	79.7	77.9	48	17	35	46.8
Global						
Incom rendah	53.8	54.4	-	-	-	-
Income menengah rendah	64.2	67.2	-	-	-	-
Income menengah atas	44.3	49.0	8	19	73	-
Income tinggi	52.6	63.5	3	15	82	-
Dunia	57.3	60.8	-	-	-	-

Reference: World Development Indicators. (2004). The World Bank. / Human Development Indicators. (2004). UNDP.

Pada tahun 2002 sekitar 59% perempuan usia 15 – 60 tahun di Indonesia ada pada angkatan kerja tingkatnya lebih rendah dibandingkan dengan Thailand 78% atau China 80%. Tetapi angka-angka itu tentunya lebih tinggi dari rata-rata negara-negara income rendah, 54%. Antara tahun 1995 dan 2001 kira-kira 42% pekerja perempuan di Indonesia ada di sektor pelayanan. Pertumbuhannya 27% dari 33% tahun 1980 tapi kalau dibandingkan dengan Malaysia, Philipina, Rep. Korea dan Singapura yang angkanya relevan 57%, 63%, 70% dan 81%, prosentase perempuan pekerja di sektor pelayanan di Indonesia relatif kecil. Perempuan di sektor non-pertanian di Indonesia secara umum terbatas sampai kira-kira 30% dibanding dengan 37% di Malaysia, 39% di China, 42% di Philipina dan Rep. Korea, 47% di Thailand dan Singapura.

Tabel 5: Status pendidikan perempuan

	Tingkat perempuan masuk sekolah kelas 1, % kelompok usia relevan (2001-2002)	Andil perempuan sampai kelas 5, % dari kelas 1, 2000-2001	Tingkat perempuan selesai SD, kelompok usia relevan, %, 2000-2001	Melek huruf perempuan, usia 15+ tahun, %	
				1990	2002
Indonesia	113	92	108	73	83
Proyek Brazil	119	-	-	81	87
Kazakhstan	106	-	99	98	99
Kenya	101	-	58	61	79
Referensi					
China	-	-	-	69	87
India	114	59	69	36	-
Malaysia	93	96	-	74	85
Philipina	127	83	94	91	93
Rep. Korea	100	100	-	-	-
Singapura	-	-	-	83	89
Thailand	92	96	90	89	91
Global income rendah	105	68	68	42	53
Income menengah rendah	97	-	96	74	82
Income menengah atas	101	92	90	88	92
Dunia	104	-	-	63	71

Reference: World Development Indicators. (2004). The World Bank.

Pendidikan perempuan muda dan perempuan dewasa di Indonesia kelihatannya tidak mempunyai tantangan besar, walaupun ada kesempatan untuk peningkatan. Tingkat yang masuk dan menyelesaikan Sekolah Dasar melebihi 100%. Kira-kira 92% kelas 1 siswa mencapai kelas 5, tingkat berlangsungnya sama dengan apa yang terjadi pada negara-negara yang punya income menengah lebih tinggi. Diharapkan melek huruf perempuan dewasa pada tahun 2002, 83% mendekati rata-rata negara yang mempunyai income menengah kebawah 82%. Untuk 20 tahun terakhir dan seterusnya, tingkat melek huruf perempuan di Indonesia bertambah sampai 14%, tingkatnya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan kenaikan global 13%. Tetapi dengan mempertimbangkan China yang tingkat melek huruf perempuannya tumbuh sampai 26% dari 69% pada tahun 1990 – 80% tahun 2002, Indonesia bisa mengharapakan kenaikan bahkan lebih besar.

Tabel 6: Persamaan Gender, Status kesehatan re-produksi dan kerentanan perempuan.

	Ranking GDI ⁴⁰	Perempuan yang mengepalai rumah tangga, total %	Tingkat kesuburan remaja, kelahiran per 1000 perempuan, usia 15 – 19 tahun, 2002	Perempuan hamil menerima perawatan pre-natal, %, 1995-2002	Kelahiran yang dibantu oleh staf kesehatan yang terampil total %, 1995-2002	Perbandingan kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, perkiraan model 2000
Indonesia	90	12 (1997)	52	89	64	230
Proyek Brazil	60	20 (1996)	68	86	88	260
Kazakhstan	63	33 (1999)	35	91	99	210
Kenya	114	31 (1998)	100	76	44	1,000
Referensi China	71	-	15	90	76	56
India	103	10 (98-99)	98	60	43	540
Malaysia	52	-	23	-	97	41
Philipina	66	14 (1998)	33	86	58	200
Rep. Korea	29	-	4	-	100	220
Singapura	28	-	8	-	100	30
Thailand	61	-	72	92	99	44
Global Income rendah		-	98	-	41	657
Income menengah bawah	Norwegia: 1 Hungaria: 35 Mexico: 50 Maroko: 100 Pakistan: 120 Nigeria: 144	-	33	-	78	112
Income menengah atas		-	54	-	92	67
Income tinggi		-	24	-	99	13
Dunia		-	63	-	60	403

Reference: World Development Indicators. (2004). The World Bank. / Human Development Indicators. (2004). UNDP.

Walaupun ada partisipasi aktif penduduk perempuan dalam pendidikan dan angkatan kerja, indeks perkembangan yang berhubungan dengan gender (GDI) di Indonesia rankingnya relatif rendah 90 dari 144 diantara 7 negara yang menjadi referensi hanya India (103) dibawah Indonesia.

Sementara perempuan mengepalai rumah tangga tidak umum di Indonesia (12%) dibandingkan dengan negara-negara yang dalam transisi (misalnya 33% di Kazakhstan) atau didaerah –daerah yang kena wabah epidemik (misalnya 31% di Kenya). Tingkat kesuburan masa remaja (52) relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara komunis (Misalnya China (15) atau Kazakhstan (35) tapi tentunya lebih rendah dari rata-rata negara yang mempunyai income rendah 98% atau rata-rata global 63%.kerentanan sosial negara diukur dalam 2 faktor ini tidak terlalu tinggi.

89% perempuan hamil di Indonesia menerima perawatan Pre-natal (sebelum melahirkan), sama dengan China (90%) dan Thailand (92%) tetapi bila kita sampai

⁴⁰ Gender-related development index (GDI) “adjusts the average achievement to reflect the inequalities between men and women” in life expectancy at birth, adult literacy and school enrolments, and estimated earned income (PPP US\$). Source: Human Development Indicators. (2004). UNDP.

pada prosentase kelahiran yang dibantu oleh petugas kesehatan trampil prosentasenya lebih rendah sampai 64% jauh lebih rendah dari 76% di China, 97% Malaysia, 99% Thailand atau 100% di Rep. Korea dan Singapura. Ini dapat tergambar di Indonesia perbandingan kematian Ibu melahirkan relatif tinggi sampai 230 setiap 100.000 kasus, sementara di China, Thailand, Malaysia, Singapura dan Rep. Korea 56, 44, 41, 30 dan 20.

4. Pendidikan

Tabel 7: Pendidikan Keuangan

	Income per kapita nasional kotor PPP (\$), 2002	Pengeluaran sekolah negeri untuk pendidikan GDP %, 2001-2002	Pengeluaran sekolah negeri pada pendidikan, total pengeluaran negara %, 2001-2002	Gaji guru dalam % pengeluaran sekolah negeri pada pendidikan 2001	Pengeluaran sekolah negeri per siswa per kapita GDP %		
					SD 2001-2002	SLTP/SLTA 2001-2002	Perguruan tinggi 2001-2002
Indonesia	3.070	1.3	9.6	78.3	3.7	7.3	21.0
Proyek Brazil	7,450	4.0	10.4	-	10.7	10.0	48.5
Kazakhstan	5,630	4.4	-	-	-	-	-
Kenya	1,010	6.3	22.5	-	0.9	2.2	256.7
Referensi		2.2		-	5.4	12.5	102.4
China	4,520	-	-	-	(1990-1)	(1990-1)	(1990-1)
India	2.650	4.1	12.7	-	13.7	23.0	85.8
Malaysia	8,500	77.9	25.2	67.2	17.0	27.5	83.5
Philipina	4,450	3.2	-	87.5	11.8	9.4	13.9
Rep. Korea	16,960	3.6	17.4	77.6	18.4	16.8	7.4
Singapura	23,730	-	-	-	-	13.6 (1990-1)	43.4 (1990-1)
Thailand	6,890	5.0	28.3	62 (1990-1)	15.9	13.0	31.1
Global Income rendah	2,110	3.1	-	N. America +W. Europe: 60.1	-	-	-
Income menengah rendah	5,290	4.0	-		-	-	-
Income menengah atas	9,550	4.4	13.7		12.4	16.9 (1990-1)	30.6
Income tinggi	28,480	5.2	11.5		26.2	31.0 (1990-1)	66.5
Dunia	7,820	4.1	-		-	-	-

Reference: World Development Indicators, (2004). The World Bank. / EFA Global Report. (2004). Paris: UNESCO Publishing.

Pengeluaran pendidikan dari pemerintah di Indonesia sebagai prosentase GDP benar-benar rendah (1,3%) jauh lebih rendah dari rata-rata negara yang mempunyai income rendah, 3,1%. Ini sebaliknya tergambar dalam prosentase pengeluaran sekolah negeri per siswa dari GDP per kapita. Indonesia menghabiskan persiswa kira-kira 4% dari GDP per kapita pada pendidikan dasar, sementara di India, Malaysia, Philipina, Thailand dan Rep Korea 10 %; dan dinegara maju lebih dari 26%.

Investasi yang rendah dalam pendidikan di Indonesia juga dilihat dalam hubungan dengan prosentase pengeluaran negara pada pendidikan sebagai prosentase pengeluaran total pemerintah 9,6%. Ini tingkatnya sangat rendah dibandingkan dengan 12,7% di

India, 17,4% di Rep. Korea, 25,2% di Malaysia atau 28,3% di Thailand. 78,3% pengeluaran sekolah negeri di Indonesia dihabiskan untuk gaji guru sementara hal yang sama prosentasenya di Malaysia dan di Thailand 67,2% (tahun 2000) dan 62% (tahun 1990).

Tabel 8: Pengeluaran pendidikan negeri dengan tingkat pendidikan total %, tahun 2000-2001

	PAUD	SD	SLTP-SLTA	Perguruan Tinggi	Tidak dialokasikan
Indonesia	0.1	39.9	41.1 / n.a	18.9	-
Bangladesh	6.9	30.9	48.9 / 0.2	13.0	-
Brazil	9.0	33.3	36.1 / n.a	21.6	-
Kamboja	2.6	61.7	23.3 / 6.9	5.5	-
Malaysia	1.2	30.9	34.7 / 0.8	29.1	3.4
Philippina	0.1	60.4	22.4 / 1.9	14.5	2.2
Rep. Korea	1.0	43.5	38.3 / n.a	10.4	6.8
Australia	1.2	33.3	39.4 / 1.4	24.0	0.7
Francis	11.7	20.2	49.7 / 0.1	17.1	1.3
Jerman	7.9	15.2	49.4 / 2.3	23.4	1.7
Hungaria	14.0	20.0	41.6 / 3.0	18.9	2.6
Polandia	10.6	46.7	24.9	14.5	3.3

Reference: UNESCO Institute of Statistics. (2004). Global Education Digest. Montreal: UNESCO Institute of Statistics

Seperti di Rep. Korea, di Indonesia, SD dan SLTP-SLTA menghabiskan kira-kira 80% anggaran pendidikan. Pengeluaran biaya pendidikan pada pendidikan anak usia dini seperti diprosentasikan pada anggaran pendidikan 0,1% yang berarti berada diantara negara negara yang paling terendah.

Tabel 9: Tingkat aksara pemuda dan orang dewasa

	Tingkat aksara orang dewasa umur 15 ke atas, %				Tingkat aksara pemuda umur 15 – 24, %			
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan	
	1990	2002	1990	2002	1990	2002	1990	2002
Indonesia	87	92	73	83	97	99	93	98
Proyek Brazil	83	86	81	87	91	99	93	98
Kazakhstan	99	100	98	99	100	100	100	100
Kenya	81	90	61	79	93	93	96	
Referensi China	87	95	69	87	97	99	93	99
India	62	-	36	-	73	-	54	-
Malaysia	87	92	74	85	95	97	94	97
Philipina	92	93	91	92	97	94	97	96
Singapura	94	97	83	89	99	99	99	100
Thailand	95	5	89	91	99	98	98	98
Global Income rendah	64	72	42	53	75	82	59	70
Income menengah rendah	87	92	74	82	95	96	91	94
Income menengah atas	92	95	88	92	97	98	95	98
Dunia	79	84	63	71	87	89	78	83

Reference: World Development Indicators. (2004). The world Bank

Seperti di negara-negara lain dibuktikan dari wilayah, tingkat aksara generasi yang lebih muda usia 15-24 tahun di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan hampir 100 %, mendekati tingkat negara-negara yang mempunyai income menengah atas. Melek aksara orang dewasa antara perempuan usia 15 tahun keatas di Indonesia masih relatif rendah,83%, tetapi ini jauh diatas rata-rata dunia 71% atau rata-rata negara-negara

berpenghasilan rendah, 53%, walaupun negara-negara lain menunjukkan tingkat aksara lebih tinggi.

Tabel 10: Partisipasi dan efisiensi internal pada SD, SLTP,SLTA

	Rasio pendaftaran bersih di SD 2001-2002	Tingkat menyelesaikan SD, 2000/2001 – 2002/2003	Yang mengulang SD, 2001/2002	Pendidikan transisi SLTP/SLTA, 2000	Rasio pendaftaran bersih di SD, 2001	Yang mengulang di SLTP/SLTA, 2001
Indonesia	92	107	5.3	79.5	47.4	0.3
Proyek Brazil	97	82	21.5	84.0	71.6	18.0
Kazakhstan	90	99	0.2	98.8	84.1	0.2
Kenya	70	56	-	73.1	24.0	-
Referensi China	93	102	0.6	-	-	-
India	83	77	3.7	88.9	-	4.8
Malaysia	95	-	-	99.7	69.4	-
Philipina	93	90	2.3	97.8	56.5	2.6
Rep. Korea	99	-	-	99.6	88.6	-
Thailand	86	91	3.9	91.7	-	-
Global Income rendah	80	74	6.7	Pertengahan Negara maju: 98.9 Negara berkembang 84.0 Dunia 90,8	Pertngahan Negara maju: 90,0 Berkmbng 48,5 Dunia 54,9	Pertngahan Dunia 4.4 Berkmbng 7,4
Income menengah rendah	91	97	4.7			
Income menengah atas	93	89	5.2			
Income tinggi	97	-	-			
Dunia	88	-	5.6			

Reference: World Development Indicators. (2004). The World Bank. / EFA Global Monitoring Report. (2004). Paris: UNESCO Publishing

Rasio partisipasi murni pendidikan dasar di Indonesia mencapai 92%, mendekati rata-rata negara berpenghasilan menengah. Tingkat yang menyelesaikan pendidikan sekolah dasar diatas 100%; tetapi pengulangan secara relatif tinggi (5,3%) dibanding dengan negara-negara yang jadi referensi.

Sementara sekali mereka berjalan, 80% tamatan sekolah dasar melanjutkan ke tingkat SLTP/SLTA, tingkatnya sedikit lebih rendah dari negara-negara yang sedang berkembang dengan rata-rata 84% atau angka medium dunia 91%. Perbandingan partisipasi murni pendidikan lanjutan SLTP/SLTA masih dibawah 50% sementara rata-rata dunia sekitar 50%. tingkat mengulang yang tak berarti di SLTP/SLTA (0.3%). Efisiensi internal dipendidikan SLTP/SLTA tidak menjadi masalah utama, tetapi masalahnya pada partisipasinya.

Tabel 11: Tingkat Pengulangan berdasarkan kelas pada pendidikan dasar, %, Tahun 2000

	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6
Indonesia	10.8	6.6	5.4	4.2	2.9	0.5
Proyek Brazil	31.1	19.1	16.1	14.2	-	-
Kazakhstan	0.1	0.3	0.2	0.1	-	-
Kenya	7.2	-	-	-	-	-
Referensi China	1.2	0.2	0.2	0.1	0.1	-
India	3.5	2.7	3.9	4.2	4.5	-
Philipina	5.2	2.7	1.9	1.3	1.0	0.5
Thailand	9.7	3.9	3.6	-	-	1.2
Negara maju	10.7	7.9	7.7	7.5	6.3	5.8
Dunia	6.5	5.4	5.2	5.3	-	-

Reference: EFA Global Monitoring Report. (2004). Paris: UNESCO Publishing

Dikebanyakan negara pengulangan terjadi di kelas 1 tetapi di Indonesia (10.8%) lebih tinggi dari negara-negara lain atau wilayah yang ditunjuk, kecuali Brazil. Efisiensi internal pada transisi dari anak dini usia kesekolah formal perlu perhatian.

Tabel 12 : Partisipasi di sekolah swasta total pendaftarannya dalam % di SD, SLTP dan SLTA.

	PAUD	SD	SLTP/SLTA
Indonesia	98.8	16.0	42.7
Proyek Brazil	28.7	8.1	11.3
Kazakhstan	11.9	0.6	0.9
Kenya	10.4	5.6	4.2
Referensi China	-	-	-
India	3.7	15.5	42.0
Malaysia	41.1	3.8	6.6
Philipina	46.0	7.1	21.5
Rep. Korea	77.5	1.4	38.4
Thailand	20.2	12.9	6.4
Global Negara maju	7.8	4.2	7.1
Negara Berkembang	55.5	10.9	14.9
Dunia	40.1	7.2	11.7

Reference: EFA Global Monitoring Report. (2004). Paris: UNESCO Publishing

Diketiga tingkat pendidikan, Indonesia mempunyai prosentase partisipasi yang sangat tinggi disekolah swasta. Inilah yang menjadi masalah di pendidikan anak usia dini, dimana partisipasi swasta ⁴¹hampir 100% jumlahnya. Di negara maju 8%. Indonesia berusaha dalam 10 tahun terakhir ini untuk mengurangi partisipasi di sekolah swasta dalam pendidikan. Bahkan kemudian tingkat ini masih sangat tinggi baik secara perspektif global maupun regional.

⁴¹ Service that are not operated (controlled and managed) by a public authority. A private institution can be FUNDED by a public authority.

Tabel 13 : Rasio siswa-guru dan guru terlatih di PAUD, SD, SLTP dan SLTA

	PAUD		SD		SLTP/SLTA	
	Guru terlatih, %, 2000	Rasio guru/siswa 2001	Guru terlatih, %, 2000	Rasio siswa/guru 2001	Guru terlatih, %, 2000	Rasio siswa/guru 2001
Indonesia	71.3	13	93.5	21	53	14
Proyek Brazil	87.0	19	91.9	23	79.3	19
Kazakhstan	-	5	-	19	-	12
Kenya	-	26	74.2	48	-	23
Referensi						
China	-	26	96.8	20	-	19
India	-	40	-	40	-	32
Malaysia	-	23	95.9	20	52.7	18
Philipina	-	30	-	35	-	38
Rep. Korea	-	22	-	32	-	20
Singapura	-	-	-	-	-	-
Thailand	-	25	-	19	-	-
Negara maju	-	14	-	15	-	12
Negara berkembang	-	21	-	28	-	20
Dunia	-	18	-	22	-	17

Reference: EFA Global Monitoring Report. (2003). Paris: UNESCO Publishing. / EFA Global Monitoring Report. (2004). Paris: UNESCO Publishing.

Sekitar 71% guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia ditatar. Rasio siswa/guru di PAUD 13 pada tahun 2001, dan rasio lebih rendah daripada negara-negara yang ada dalam referensi. Rasio siswa/guru rendah di pendidikan anak usia dini di Indonesia mungkin dihubungkan dengan kenyataan bahwa 100% pendidikan anak usia dini di lembaga swasta dimana rasio siswa/guru rendah tidak dapat dibiayai. Di SLTP dan SLTA juga menunjukkan rasio siswa-guru rendah (14 tahun 2001), mendekati pertengahan-medium negara-negara maju 12. tetapi pendidikan SLTP/SLTA di Indonesia seperti di Malaysia menunjukkan presentasinya rendah dari guru yang ditatar (53%).

Tabel 14: Perkembangan anak dan lingkungan sehat

	Tingkat kematian dibawah 5 tahun 2002	Tingkat imunisasi anak, campak 2002	Meratanya kekurangan gizi anak, dibawah umur 5 tahun, %, 1996-2002		Pengeluaran negeri untuk kesehatan, GDP %, 2001	Pengeluaran kesehatan swasta, total % 2001	Akses untuk sumber air yang bagus, penduduk %	Akses fasilitas sanitasi diperbaiki, penduduk %	
			Berat untuk usia	Tinggi untuk usia				2000	1990
Indonesia	43	76	25	-	0.6	74.9	78	47	55
Proyek Brazil	37	93	6	11	3.2	5.8	87	71	76
Kazakhstan	99	95	4	10	1.9	39.6	91	-	99
Kenya	122	78	22	33	1.7	78.6	57	80	87
Referensi									
China	38	65	10	14	2.0	62.8	75	29	40
India	90	67	47	45	0.9	82.1	84	16	28
Malaysia	8	92	-	-	2.0	46.3	-	-	-
Philipina	37	73	32	32	1.5	54.8	86	74	83
Rep. Korea	5	97	-	-	2.6	55.6	92	-	63
Singapura	4	91	-	-	1.3	66.5	100	100	100

Thailand	28	94	-	-	2.1	42.9	84	79	96
Global Income rendah	121	65	42	-	1.1	73.7	76	30	43
Income menengah bawah	40	78	9	17	2.7	52.8	81	45	58
Income menengah atas	22	94	-	-	3.7	42.3	-	-	-
Income tinggi	7	90	-	-	6.3	37.9	-	-	-
	81	72	-	-	5.6	40.8	81	45	55

Reference: world Development Indicators. (2004). The World Bank.

Tingkat kematian dibawah 5 tahun di Indonesia (43) jauh lebih rendah rata-rata dunia 81, atau rata-rata negara-negara berpenghasilan rendah 121. Ini mendekati rata-rata negara-negara yang berpenghasilan menengah kebawah 40. Tapi kalau dilihat dalam wilayah, Indonesia tidak punya ruang untuk kepuasan diri sendiri: semua negara-negara referensi regional kecuali India menunjukkan tingkat jauh lebih rendah dari Indonesia.

Tingkat imunisasi anak untuk cacar di Indonesia 76%, mendekati rata-rata negara yang berpenghasilan menengah kebawah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah kebawah (9%), Indonesia menunjukkan prosentase jauh lebih tinggi anak-anak busung lapar (25%) secara tidak langsung bahwa usaha lebih banyak dibutuhkan untuk memperbaiki gizi anak.

Pengeluaran pemerintah Indonesia untuk kesehatan prosentase GDP (2001) 0,6% hanya kira-kira setengah dari rata-rata negara yang berpenghasilan rendah 1,1% pengeluaran kesehatan swasta jumlahnya tertinggi dalam wilayah sampai 75%.

Sekitar 80% penduduk Indonesia punya akses untuk perbaikan sumber air tetapi mereka yang mempunyai akses fasilitas sanitasi yang meningkat terbatas sampai 55% tahun 2000, walaupun peningkatatn 17% dari 47 % tahun 1990 selama masa yang sama, negara-negara dalam wilayah referensi membuat peningkatan lebih banyak pada akses penduduk mereka untuk perbaikan fasilitas sanitasi – 75% di India, 38% di China, 22% di Thailand dan sekitar 43 % dan 29% di negara-negara yang mempunyai income menengah bawah.